HIZMELINA, SH

NOTARIS DI JAKARTA

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

SK. MENKEH : Tgl. 1 Oktober 1998
No. C - 240 HT. 03. 02 - Th. 1998
SK MENEG AGRARIA / Kepala BPN. : Tgl. 11 Februari 1999
No. 6 - XI - 1999

KANTOR

Jl. Kebagusan Raya No. 79 RT. 003 RW. 04
Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp. (021) 787 3494 E-mail : notaris_hizmelina@yahoo.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA

NOMOR : 11.-

TANGGAL : 20 Januari 2016

SALINAN

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

PERNYATAAN KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Nomor : 11.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-01-2016 (duapuluh Januari duaribu enambelas), pukul ------ 16.30 WIB (enambelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----------

-Berhadapan dengan saya, **HIZMELINA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan ---------- dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir-akta ini : ------

-**Tuan ANDRI ASLAN,** lahir di Jakarta pada tanggal 20-06-1963 (duapuluh Juni seribu sembilanratus enampuluh tiga), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Kamang Nomor 44 Kaveling C -3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174062006630004, Warga Negara Indonesia, ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dalam kedudukannya selaku Ketua Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA, demikian sebagaimana ternyata dari Berita Acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2015 yang akan diuraikan di bawah ini. ----------

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : ----------

-Bahwa dimulai tanggal 13-12-2015 (tigabelas Desember duaribu limabelas) hingga tanggal -- -14-12-2015 (empatbelas Desember duaribu limabelas) bertempat di The Alana Yogyakarta Hotel & Covention Center, Foyer Ballroom Amarta Pura diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa tahun 2015 ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA (selanjutnya disebut "MUNASLUB"). ----------

-Bahwa ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perkumpulan yang didirikan pada tanggal 15-08-1996 (limabelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh enam) di Jakarta, dan kemudian anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan DARBI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tertanggal 16-08-1996 (enambelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh enam) Nomor 148, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, dan kemudian diubah dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 28-09-2011 (duapuluh delapan September duaribu sebelas) Nomor 13, Perkumpulan mana telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia demikian sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 06-10-2011 (enam Oktober duaribu sebelas) Nomor : AHU-158.AH.01.06.TH. 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-12-2011 (enambelas Desember duaribu sebelas) Nomor 55/2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 100, anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris terakhir tertanggal 31-08-2012 (tigapuluh satu Agustus duaribu duabelas) Nomor 31, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09-04-2013 (sembilan April duaribu tigabelas) Nomor: AHU-65.AH01.08.Tahun 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal10-09-2013 (sepuluh September duaribu tigabelas) Nomor 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21/Perk/2013, dan dengan akta saya, Notaris, tertanggal 23-06-2014 (duapuluh tiga Juni duaribu empatbelas) Nomor 12, telah diangkat Pengurus dan Pengawas Perkumpulan serta telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29-12-2014 (duapuluh sembilan Desember duaribu empatbelas) Nomor AHU-233.AH.01.08 Tahun 2014, (selanjutnya disebut APJII), ----------

-terakhir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta tanggal 11-06-2015 (sebelas Juni dua ribu limabelas) Nomor 05, yang dibuat dihadapan saya, Notaris. ----------

-Bahwa Berita Acara Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII tersebut yang dibuat di bawah tangan tertanggal 14-12-2015 (empatbelas Desember duaribu limabelas) bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh ERI ARYANTO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Kabupaten Sleman tertanggal 14-12-2015 (empatbelas Desember duaribu limabelas Nomor : 931/Leg/XII/2015, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Bahwa seluruh anggota APJII adalah sebanyak 340 (tigaratus empat puluh) Perusahaan dan anggota APJII yang berhak untuk mengikuti MUNASLUB APJII adalah yang telah memenuhi syarat administrasi yaitu sebanyak 275 (duaratus tujuhpuluh lima) Perusahaan, telah diundang untuk mengikuti MUNASLUB tersebut. ----------

-Bahwa total Perusahaan yang hadir sampai dengan hari II (Kedua) MUNASLUB adalah sebanyak 158 (seratus limapuluh delapan) Perusahaan dan menurut Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga APJII quorum dan keabsahan rapat sekurang-kurangnya dihadiri ½ (satu per dua) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu), sehingga dengan demikian MUNASLUB APJII tahun 2015 dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah. --------

-Bahwa perhitungan hak suara kehadiran anggota APJII dalam MUNAS terdiri dari 3 (tiga) --------

kategori yaitu : ----------

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

1. Perusahaan yang mempunyai 1 (satu) ijin usaha resmi (ISP) hanya memiliki hak 1 (satu) suara sebanyak 156 (seratus limapuluh enam) Perusahaan.. ----------
2. Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) ijin resmi memiliki hak suara sesuai dengan ijin usaha resmi yang sah dimilikinya seperti (ISP, NAP, JTT) dan lain-lain sebagaimana telah disepakati oleh anggota APJII dalam Tata Tertib MUNASLUB APJII tahun 2015 ------
-pada Bab IV : Hak dan Kewajiban Peserta Pasal 5 ayat 3 yang isinya sebagai berikut : -
"Setiap peserta MUNAS VIII APJIII yang merupakan anggota APJII memiliki hak 1 (satu) suara, sedangkan peserta yang memiliki lebih 1 (satu) ijin usaha resmi yang sah (ISP, NAP, JTT dan lain lain), mempunyai hak lebih dari 1 (satu) suara sesuai dengan jumlah ijin yang dimiliki". Dan Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) ijin usaha resmi yang sah adalah sebagai berikut : ----------
   1. PT. Cyber Network Indonesia memiliki 3 (tiga) hak suara dengan ijin usaha resmi ------ yang sah yaitu ISP, NAP dan JTT. ----------
   2. PT. Cyberindo Aditama memiliki 2 (dua) hak suara dengan ijin usaha resmi yaitu ISP - dan NAP. ----------
   3. PT. Mora Telematika Indonesia memiliki 2 (dua) hak suara dengan ijin usaha resmi ----- yaitu ISP dan NAP. ----------
   4. PT. NTT memiliki 2 (dua) hak suara dengan ijin usaha resmi yaitu ISP dan NAP. -------
   5. PT. Pasifik Satelit Nusantara memiliki 2 (dua) hak suara dengan ijin usaha resmi yaitu ISP dan NAP. ----------
   6. PT. Uninet Media Sakti memiliki 2 (dua) hak suara dengan ijin usaha resmi yaitu ISP - dan NAP. ----------
3. Berdasarkan Surat Kuasa (Proxy) dari satu Perusahaan ke Perusahaan yang lain demikian berdasarkan Pasal 29 ayat 5 Anggaran Rumah Tangga APJII, sehingga Perusahaan yang memberikan kuasa tetap mempunyai hak 1 (satu) suara, dan hak suara untuk kehadiran berdasarkan proxy ini tidak ada. ----------

-Bahwa ke 158 (seratus limapuluh delapan) anggota APJII yang hadir/diwakili dalam ----------
-MUNASLUB APJII tahun 2015 adalah sebagaimana dalam lampiran yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, sebagai berikut . ----------

1. **PT. ARSEN KUSUMA INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh **Tuan ADI KUSUMA dan Tuan BAYU BADRA MEGANANDA KEDUANYA** bertindak dalam jabatan mereka masing masing dan berturut turut selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 1. ----------

2. **PT ARSENET GLOBAL SOLUSI**, berkedudukan di Kota Kupang diwakili oleh **Tuan ADE KUSWANDI** yang bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 2. ---------
3. **PT. AMBHARA DUTA SHANTI,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan AGUS BUDI RAHARJO** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 3 dan **Nyonya KUSPUJANINGRUM**, bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 03-12-2015 (tiga Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan AGUS BUDI RAHARJO** tersebut yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan pada angka 3.----------
4. **PT. AJN SOLUSINDO**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan SEPTIAN SURACHMAN SETIAWAN,** bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan YANDI RINALDI, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan pada angka 4.----------
5. **PT. AMRON CITINET**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan A MUZAKIR**, yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 5.----------
6. **PT. ANGKASA KOMUNIKASI GLOBAL UTAMA**, berkedudukan di Jakarta Barat - diwakili oleh **Tuan DAVID SOEGIHARTO,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 6. ----------
7. **PT. ANGKASA SARANA TEKNIK KOMUNIKASI**, berkedudukan di Yogyakarta, diwakili - oleh **Tuan TIGOR JONSON PURBA, Sarjana Hukum** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 7 dan **Tuan DONNY KURNIAWAN bertindak** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 02-12-2015 (dua Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan TIGOR JONSON PURBA, Sarjana Hukum** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 7.----------

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

8. **PT. APLIKANUSA LINTASARTA,** berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh **Tuan Insinyur ANANG BUDI HARDJANTO dan Tuan GUNAWAN PRASETYO,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan karena itu untuk dan atas nama **Tuan ARYA DAMAR**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 8. ----------

9. **PT. ARTHA TELEKOMINDO**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan HENDRO PRABOWO dan Tuan HARSO BANGUN,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan karena itu untuk dan atas nama **Tuan JUNUS SISWANDI**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 9. ----------

10. **PT. ARTHATAMA ADHIPRIMA PERSADA,** berkedudukan di Jakarta Utara diwakili oleh **Tuan HENRY,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 10. ----------

11. **PT. ASIA UTAMA KONSULTAN,** berkedudukan di Jakarta Barat, diwakili oleh **Tuan** ----- **DJOKO HERMAN PRAJITNO,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : **Nyonya NINING KRISTIANA, S.PSI**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 11. -----

12. **PT. BALI NING**, berkedudukan di Badung – Bali, diwakili oleh **Nona PUTU HEGAPUTRI AYU LESTARI,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan I GEDE PUTRAYASA**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 12. ----------

13. **PT. BALI SOKET INFORMINDO,** berkedudukan di Denpasar - Bali, diwakili oleh **Tuan** -- **PUTU EKO SUKARNO dan Tuan NGURAH WIRA PRATAMA,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 01-12-2015 ---------- (satu Desember duaribu limabelas) dari dan karena itu untuk dan atas nama **Tuan I**

MADE ARTANA, Sarjana Komunikasi yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 13. ----------

14. **PT. BIT TEKNOLOGI NUSANTARA,** berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan TAUFIQURROCHMAN, bertindak** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan NOBEL TANIHAHA** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 14. ----------

15. **PT. BLAMBANGAN CAHAYA TIMUR**, berkedudukan di Banyuwangi diwakili oleh **Tuan MAS AAJI PRIAMBORO dan. Tuan CUCUK RUSTANDI**,Sarjana Ekonomi, keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan SATRIA HARIKUSFANTO** tersebut yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 15. ----------

16. **PT. CAHAYA BUANA RAKSA**, berkedudukan di Kabupaten Karawang, diwakili oleh **Tuan NANA SUHERNA** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakii Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 16 dan **Tuan ASEP SAEPUDIN** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan NANA SUHERNA** tersebut, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 16. ----------

17. **PT. CAKRA LINTAS NUSANTARA**, berkedudukan di Kabupaten Badung, diwakili oleh **Tuan ARNOLD MAKASAU** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 17. ----------

18. **PT. CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan MUKHAMAD MUSLIKHUDIN**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan JOHANNES ADRI TANZIL,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 18.----------

19. **PT. CEMERLANG MULTIMEDIA**, berkedudukan di Kabupaten Bandung, diwakili oleh **Tuan SEDI, Sarjana Komunikasi** dan **Tuan HARYANTO MULYONO**, **Sarjana Komunikasi** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember limabelas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan SUWANDI TAMSIR**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur demikian mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 19. ----------

20. **PT. CITRA JELAJAH INFORMATIKA**, berkedudukan di Bandung diwakili oleh **Tuan SONY SETIADI dan Nyonya ARY RETNONINGSIH,** masing-masing bertindak dalam jabatan mereka selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 20. ----------

21. **PT. COMTRONICS SYSTEM**, berkedudukan di Bandung diwakili oleh **Tuan HARTONO CHANDRA** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 21 dan **Tuan SETIAJI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan HARTONO CHANDRA** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 21. ----------

22. **PT. CYBER NETWORK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan Insinyur BENYAMIN P NAIBAHO,** Magister Manajemen, bertindak dalam ------ jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 23 dan **Nyonya DEBBY E LANGI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan Insinyur BENYAMIN P NAIBAHO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 22. ----------

23. **PT. CYBER NETWORK INDONESIA** pada angka 22 **(untuk ijin usaha ITT),** diwakili oleh **Tuan Insinyur BENYAMIN P NAIBAHO, Magister Manajemen**, bertindak dalam -- jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas

nama Perseroan pada angka 22 dan **Nyonya DEBBY E LANGI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan Insinyur BENYAMIN P NAIBAHO, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 22.----------

24. **PT. CYBER NETWORK INDONESIA** pada angka 22 **(untuk ijin usaha NAP)**, diwakili oleh **Tuan Insinyur BENYAMIN P NAIBAHO,** Magister Manajemen, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 22 dan **Nyonya DEBBY E LANGI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan Insinyur BENYAMIN P NAIBAHO, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan daridan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 22.----------

25. **PT. CYBERINDO ADITAMA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan** ------- **MARCELIUS ARDIWINATA,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BAYU DANI DANARTO SUMARSONO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 25. ----------

26. **PT. CYBERINDO ADITAMA**, berkedudukan di Jakarta Selatan **(untuk ijin Usaha NAP)** diwakili oleh **Tuan HAIRUL RACHMAN,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BAYU DANI DANARTO SUMARSONO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan mewakili Dreksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 25. ----------

27. **PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI**, berkedudukan di Kota Semarang diwakili oleh **Tuan HERU SETIAWAN** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 27. ----------

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No.28 Jakarta 12520

28. **PT. DATA UTAMA DINAMIKA**, berkedudukan di Semarang, diwakili oleh Tuan **RUBEN MANURUNG** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan EDI KURNIAWAN** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 28. ----
29. **PT. DELTA NUSANTARA NETWORKS**, berkedudukan di Jakarta Barat, diwakili oleh **Tuan ARYANTO KOESDINAR yang** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 29. ----------
30. **PT. DUTA MEDIALINK,** berkedudukan di Balikpapan Utara diwakili oleh **Tuan IMBRAN KIKI** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 30. ----------
31. **PT. DETIK INI JUGA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan SARWANI DWINANTO** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal ---- 30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BUDIONO DARSONO**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 31. ----------
32. **PT. DEWATA TELEMATIKA**, berkedudukan di Denpasar – Bali, diwakili oleh **Tuan CHAHYADI AWAN HANDAYANTO,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 33 dan **Tuan YUSUF RIDHO,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 03-12-2015 (tiga Desember duaribu lima belas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan CHAHYADI AWAN HANDAYANTO, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 32. ----------
33. **PT. DHECYBER FLOW INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan BAMBANG EKO PRAKOSO** dan **Tuan ACHMAD BAGUS RATMINTO**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas) dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan RONALD SOETRISNO** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku

Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi dan Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 33.----------

34. **PT. DIAN NUSWANTORO TEKNOLOGI DAN INFORMASI (DINUSTEK)**, berkedudukan di Semarang diwakili oleh **Tuan RAMA ARIA MEGANTARA** yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan MOHAMAD SIDIQ, SSI. M KOM,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 34. ----------

35. **PT. DIGITAL SATELITE INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan SUGIHARTO SULAIMAN dan Tuan BAMBANG ARIF JATMIKO**, masing-masing bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 35. ------

36. **PT. DIGITAL WIRELESS INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan HENRI KASYFI SOEMARTONO** dan **Tuan PANDU TEGUH HANDOJO** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BAMBANG ARIF JATMIKO**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian mewakili Direksi dan Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 36. ----

37. **PT. DWI TUNGGAL PUTRA**, berkedudukan di Surabaya, diwakili oleh **Tuan TIOK PRASETYO dan Tuan FATHUROCHMAN** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan MICHAEL KURNIA WIRAWAN ALIFEN** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 37. ----------

38. **PT. EKA MAS REPUBLIK**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan RIZKI WAHYUDI dan Tuan DEDY AGUNG PRASETYO,** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 02-12-2015 (dua Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan MARTINUS** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 38. ----------

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

39. **PT. ELGA YASA MEDIA**, berkedudukan di Kota Bandung, diwakili oleh **Tuan ROSA SANJAYA PICESA,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 39 dan **Tuan DANY YUNIARDI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ROSA SANJAYA PICESA MARTINUS** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 39. -----

40. **PT. FAJAR TECHNO SYSTEM**, berkedudukan di Kota Makasar diwakili oleh **Tuan KHALIL SYAMSU,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 40. ----------

41. **PT. FASTEL SARANA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan TRI BUDIANTO, Sarjana Ekonomi,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan YONATAN HENDRATNO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 41. ----------

42. **PT. GARUDA MEDIA INFORMATIKA**, berkedudukan di Kabupaten Badung, diwakili oleh **Tuan PUTU AGUSTINUS dan Tuan I PUTU SUPUTRA ADI JAYA,** keduanya ----- bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 11-12-2015 (sebelas Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BAMBANG HANDOKO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam -------- jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 42. ----------

43. **PT. GLOBAL PRIMA UTAMA**, berkedudukan di Yogyakarta, diwakili oleh **Tuan TAUFIK MEIDI HERIAWAN**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur demikian mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 43 dan **Tuan IVA BUDIYANTO,** Sarjana Ekonomi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan TAUFIK MEIDI HERIAWAN**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku

Direktur Perseroan demkian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 43.----------

44. **PT. GLOBAL TEKNOLOGI TERAINDO**, berkedudukan di Kota Bekasi, diwakili oleh ------ **Tuan MUHAMMAD NASHIEF DJASAM,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 44 dan **Tuan YUDI MISMARWAN,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan MUHAMMAD NASHIEF DJASAM, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 44.----------

45. **PT. GOMEDS NETWORK**, berkedudukan di Kota Gorontalo, diwakili oleh **Tuan SYAMSUDIN PIRUS, Sarjana Teknik dan Tuan ZULHARMAN** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 11-12-2015 (sebelas Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ROLINS HUMONGGIO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 45. ----------

46. **PT. GRAHA TELEKOMUNIKASI INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, -------- diwakili oleh **Tuan NAEK M SIBARANI dan Tuan TEGUH S KURITA,** bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas)) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan PANGKU RAJA L GAOL,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 46.----------

47. **PT. HAWK TEKNOLOGI SOLUSI,** berkedudukan di Cirebon diwakili oleh **Tuan** -------- **HARIJANTO PRIBADI,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 47. ----------

48. **PT. HIPERNET INDODATA**, berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh **Tuan EDDY SANTOSO JAYA,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan OEI SUDIANTO** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 48. -----

49. **PT. HUTCHISON 3 INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan FX BENNY DHERMAWAN dan Tuan PURWANTO** keduanya bertindak berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dan tanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama masing-masing dan berturut-turut **Tuan CHANDRA HAWAN ADEN dan Tuan RANDEEP SINGH SEKHON** yang dalam Surat Kuasa tersebut masing-masing dan berturut-turut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 49. ----------

50. **PT. IFORTE GLOBAL INTERNET,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan JOHN FERNANDUS AGUS SALIM dan Tuan DEDI SEPRINRA ARFIE**, keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan AGUNG SAMPURNA**, dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 50. ----------

51. **PT. INDO INTERNET,** berkedudukan di Kota Tangerang diwakili oleh **Tuan DEN TOSSI ISHAK**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur demikian sah mewakili Direksi ------- Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 51. ----

52. **PT. INDOMAYA WIRA SEJAHTERA,** berkedudukan di Surakarta, diwakili oleh **Tuan ATOK SUGIHARTO, Sarjana Komunikasi** dan **Tuan AJI GIRIS BINTARO**, keduanya -- bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 02-11-2015 (dua November duaribu lima belas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan AGUS WAHYU BUDI SETIAWAN** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama demikian sah mewakili sah Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 52. ----------

53. **PT. INDONUSA SYSTEM INTEGRATOR PRIMA**, berkedudukan di Jakarta Barat, ------- diwakili oleh **Tuan HERIMANTO**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 53 dan **Tuan ANDREAS,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan HERIMANTO**, tersebut yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak

dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi dan Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 53. -------

54. **PT. INDOSAT MEGA MEDIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan** ------- **FUAD FACHROEDDIN,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 54 dan **Tuan ANDRI ASLAN** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan FUAD FACHROEDDIN tersebut yang** dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 54. ----------

55. **PT. INDOSAT, TBK,** berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Nyonya ELLY NOOR - QOMARIYAH dan Tuan PANDAPOTAN R H PARDEDE,** keduanya bertindak ------- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ALEXANDER S RUSLI** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utara demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 55. ----------

56. **PT. INOVASI TJARAKA BUANA**, berkedudukan di Kota Bandung, diwakili oleh **Tuan** --- **ANDIKA BAYU HERBOWO,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 58 dan **Tuan YUNUS HIDAYAT,** bertindak ----- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan ANDIKA BAYU HERBOWO yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindaka dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 56. ----------

57. **PT. INSAN SARANA TELEMATIKA**, berkedudukan di Jakarta Barat, diwakili oleh **Tuan TRI BUDI RAHAYU dan Tuan HENRY BAGUS WICAKSONO** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 09-12-2015 (Sembilan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan FREDY CANDRA,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 57.----------

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 39 Jakarta 12520

58. **PT. INTELEX TECHNET GLOBAL,** berkedudukan di Yogyakarta, diwakili oleh **Tuan BAMBANG PRASTOWO, Sarjana Ekonomi** dan **Tuan LESMANA PREMADYANA**, keduanya bertindak berturut-turut dalam jabatan mereka selaku Direktur Utama dan selaku Direktur demikian sah mewakili Direksi dan Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 58. ----------

59. **PT. INTER MEDIA LINTAS NUSA,** berkedudukan di Kota Semarang, diwakili oleh **Tuan DHARMADI HARDO, Sarjana Komunikasi,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 59. ----------

60. **PT. INTERKONEKSI INTERNET INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan AGUSTINUS ERY HARTANTO,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 60. ----------

61. **PT. INTERLINK TECHNOLOGY**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan RUDIANSYAH,** bertindak dalam jabatannya selaku Dirtektur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 61 dan **Tuan MUHAMMAD KASIM**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan RUDIANSYAH yang dalam Surat Kuasa itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 61. ----------

62. **PT. INTERNUX**, berkedudukan di Kota Makassar, diwakili oleh **Tuan AGUS HARIMAWAN,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 02-12-2015 (dua Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Nona INDRYANARUM** yang dalam Surat Kuasa itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 62. ----------

63. **PT. INTI INFORMATIKA**, berkedudukan di Palembang, diwakili oleh **Tuan ANDRY WIJAYA,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 63 dan **Tuan PUJO MULYONO SWASTIKA AMW**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 02-12-2015 (dua Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan ANDRY WIJAYA yang dalam Surat Kuasa

tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 63. ----------

64. **PT. JAGAT MEDIA TEKNOLOGI,** berkedudukan di Purwodadi, Kabupaten Grobongan, diwakili oleh **Tuan AHMAT MUNIF** dan **Tuan ANATOLY BATUAJI**, keduanya bertindak masing-masing dan berturut-turut dalam jabatan mereka selaku Direktur Utama dan ------ Direktur demikian sah mewakili Direksi dan Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 64. ----------

65. **PT. JALA LINTAS MEDIA**, berkedudukan di Kabupaten Bogor, diwakili oleh **Tuan** ------ **VICTOR IRIANTO,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk atas nama Perseroan pada angka 65. ----------

66. **PT. JARINGAN LINTAS UTARA**, berkedudukan di Sleman, diwakili oleh **Tuan JOKO PRASETYO**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Nyonya Nurbani**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 66. ----------

67. **PT. JASA JEJARING WASANTARA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan Insinyur MADE MUDHITA dan Tuan MUCH RIF'AN**, keduanya bertindak dalam jabatan mereka selaku Direktur demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 67. ----------

68. **PT. JASNITA TELEKOMINDO**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan** ------ **SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN bertindak dalam** jabatannya selaku Direktur Utama demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 68. ----------

69. **PT. JAVA ONLINE**, berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh **Tuan AGUS** -------- **SUPRIYADI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ADI SUSYOKO**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 69. ----------

70. **PT. JEMBATAN CITRA NUSANTARA**, berkedudukan di Surakarta diwakili oleh **Tuan VALENS YANUAR RIYADI dan Tuan BONIFATIUS RIZA TANTULAR**, masing-masing

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

dan berturut-turut bertindak dalam jabatan mereka selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan demikian mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 70. ----------

71. **PT. JETCOMS NETINDO**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh Tuan ——— **HENDARWIN SAPUTRA yang** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 71.----------

72. **PT. JIVAN JAYA MAKMUR TELECOM**, berkedudukan di Surabaya – Kota Surabaya, diwakili oleh **Nyonya ELVI JULISTYANTI dan NONA YUANITA KARTIKA SARI,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 04-12-2015 (empat Desember duaribu limabelas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan SOERYAWAN SOEWANDIBIO** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatnnya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 72.----------

73. **PT. JOVIMARO KARYA AGUNG**, berkedudukan di Surabaya diwakili oleh **Tuan** -- **RONALDUS HENDRATA**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 73. ----------

74. **PT. KHASANAH TEKNOLOGI PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Barat, diwakili oleh **Tuan FADITYA FEBRIATA dan Nona LISA FRANSISKA SITOMPUL** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan HERIMANTO,** yang dalam Surat Kuasa itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 74. ----------

75. **PT. KINGS NETWORK INDONESIA,** berkedudukan di Kota Bekasi, diwakili oleh **Tuan WINDHU PRASETIA dan Tuan RINALDY WIJAYA,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan EKO PRIYONO, yang dalam Surat Kuasa tersebut** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 75.----------

76. **PT. KOMUNIKA LIMA DUABELAS**, berkedudukan di Denpasar – Bali diwakili oleh ---- **Nyonya PRISKILA SETIA NINGRUM dan Nona SRI WAHYUNI**, keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu

Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BAYU SETIA HARDIANTO,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 76. ----------

77. **PT. KOMUNIKASI LINTAS NUSA,** berkedudukan di Semarang - Kota Semarang, diwakili oleh **Tuan TOMMY WISAKSONO NORMAN** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 77. ----------

78. **PT. KUSUMA DINATHA JAYA ABADI**, berkedudukan di Kota Batam, diwakili oleh ---- **Tuan R HASTOMO dan Tuan JONI LAW**, keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan IWAYAN SOMA DIRGANTARA DINATHA,** yang dalam Surat Kuasa itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 78. ----------

79. **PT. LAXO GLOBAL AKSES,** berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan AGUSTINUS SUTANDAR,** bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 79 dan **Tuan NEMESIUS AYOM RAHWANA D S,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan ADRIANUS SUTANDAR, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 79 ----------

80. **PT. LINTAS DATA PRIMA**, berkedudukan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, diwakili oleh **Tuan WAHYU JATMIKO** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 80 dan **Tuan SAFARI ADHI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 03-12-2015 (tiga Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan WAHYU JATMIKO yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 80. ----------

81. **PT. LYNX MITRA ASIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan RONY ARDHITIA SOETEDJO,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 81. ----------

82. **PT MANDIRI LINTAS CAKRAWALA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Tuan ULUMUDIN,** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 04-12-2015 (empat Desember dua ribu lima belas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan R U MAHARDANNI, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 82. ----------

83. **PT. MATRIXNET GLOBAL INDONESIA**, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan DARWIS M POLHAUPESSY dan Tuan LUTFIL KHAKIM**, keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan FAUSI SUNGKAR,** yang dalam Surat Kuasa itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 83. ----------

84. **PT. MAXINDO MITRA SOLUSI**, berkedudukan di Jakarta Utara, diwakili oleh **Tuan JOHNSON,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 84. ----------

85. **PT MAYATAMA SOLUSINDO,** berkedudukan di Dumai, yang diwakili oleh **Tuan TEUKUMUHAMMAD SYUKRANSYAH,** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 05-12-2015 (lima Desember dua ribu lima belas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan SUHARDI**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 85. ----------

86. **PT MEDIA ANTAR NUSA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Tuan MUHAMMAD RULLY SUMBAYAK,** yang dalam jabatannya bertindak selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 88 dan **Nyonya FONNI SAFIRA LUBIS,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember dua ribu lima belas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan MUHAMMAD RULLY SUMBAYAK,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 86.----------

87. **PT MEDIA LINTAS DATA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Tuan** ---- **JAMALUL IZZA**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 92 dan **Tuan KOKO PRADWI AQUARISTA,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November dua ribu lima belas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan JAMALUL IZZA**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 87. ----------

88. **PT. MEDIA SARANA DATA**, berkedudukan di Yogyakarta, diwakili oleh **Tuan RAHMAT AJI SETIAWAN** dan **Tuan PRIYO SUYONO,** bertindak dalam jabatannya masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 88. ----------

89. **PT MEDIANET DIGITAL INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diwakili oleh **Tuan UJANG NUGRAHA bertindak** dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 89. ----------

90. **PT. MEDIANUSA PERMANA**, berkedudukan di Batam, Kepulauan Riau, yang diwakili oleh **Tuan MANGARA PARPULUNGAN PERANGIN ANGIN**, bertindak dalam ------- jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan nama Perseroan pada angka 90 dan **Tuan HANDOYO TAHER,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan R. HASTOMO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 90. ----------

91. **PT. MELVAR LINTASNUSA**, berkedudukan di Bandung, diwakili oleh **Tuan IRFAN FANANI dan Nyonya SETUA DEWI,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ANTHONIUS JOSEPH GUNAWAN,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian mewakili Perseroan dari dan oleh karna itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 91. ----------

92. **PT. MERAH PUTIH TELEMATIKA**, berkedudukan di Kota Metro, diwakili oleh **Tuan** -----

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

MUHAMMAD NUR IKHSANTO, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 92. ----------

93. **PT. MITRA AKSES GLOBALINDO**, berkedudukan di Jakarta Barat, diwakili oleh **Tuan MUHAMMAD JOHANA MASHARI,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 93. ----------

94. **PT. MNC KABEL MEDIACOM**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan FEDRICK BUDIMAN**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan GUNAWAN WICAKSONO** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 94. -------

95. **PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, dengan Ijin Usaha NAP**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan RAINALDO SINAGA dan Tuan YUDI IMANUEL INSAFA**, keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan GALUMBANG MENAK**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 95. -------

96. **PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan FIRMAN PRASETYA dan Tuan JOSUA EDYS SIMAMORA,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan GALUMBANG MENAK,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 96. ----------

97. **PT. MULTIMEDIA NUSANTARA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Tuan ARI USMAYADI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember dua ribu lima belas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan TEGUH WAHYONO** yang dalam jabatannya bertindak selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 97. ----------

98. **PT NAP INFO LINTAS NUSA,** berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh **Nona CANDRA ASTRINI dan Tuan NUSA HERLAMBANG THENDEAN** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan SANDI GUNAWAN HO**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 98. ----------

99. **PT. NARAYA TELEMATIKA**, berkedudukan di Kota Malang, diwakili oleh **Tuan DEDDY YUSTIAN,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan FIRMANTYO ADINUGROHO S.Si**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 99. ----------

100. **PT. NETTOCYBER INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan ACIL YANUAR EFFENDI dan Tuan RIZARD FIVERIANDI**, keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanaggal 03-12-2015 (tiga Desember duaribu limabelas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan CHANDRA SUHARY LIEMANTIKA**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 100. ----------

101. **PT. NTT INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh **Tuan HARYANTO KISCAHYONO**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 02-12-2015 (dua Desember duaribu limabelas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan WENDRA NATASENDJAJA** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 101. ----------

102. **PT. NTT INDONESIA (dengan Ijin NAP)**, berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh **Tuan M RIZAL,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanaggal 02-12-2015 (dua Desember duaribu limabelas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan WENDRA NATASENDJAJA** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 102. ----------

103. **PT. PADI INTERNET**, berkedudukan di Surabaya diwakili oleh **Tuan M. ZAMRONI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

(satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan RONALD WALLA** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 103. ----------

104. **PT. PALAPA MEDIA INDONESIA**, berkedudukan di Tangerang Selatan, diwakili oleh **Tuan AHMAD RIVAI,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 104 dan **Tuan DANANG WIJAYANTO,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan AHMAD RIFAI** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 104. ----------

105. **PT. PARSAORAN GLOBAL DATATRANS,** berkedudukan di Jakarta Timur diwakili oleh **Tuan HARRIS SIMON dan Tuan RICKY SIMANJUNTAK** keduanya bertindak dalam jabatan mereka selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 105.-----

106. **PT. PASCAL SOLUSI NUSANTARA,** berkedudukan di Surabaya diwakili oleh **Tuan PASKALIS DENY WIBOWO,** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 106 dan **Tuan NUR RAHMAN TIWIS SURJOKO,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 03-12-2015 (tiga Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan PASKALIS DENY WIBOWO** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 106.----------

107. **PT. PASIFIK LINTAS BUANA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan IRVAN NASRUN** dan **Tuan NASRUN SANIF,** masing-masing dan berturut-turut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 107. ----------

108. **PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan WENDI PUJA RAHAYU, Sarjana Teknik,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Nyonya ANGGARINI SURJAATMADJA**

yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 108. ----------

109. **PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA (dengan Ijin NAP),** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan HERMANSYAH,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Nyonya ANGGARINI SURJAATMADJA** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 109. ----------

110. **PT. PC24 CYBER INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Nyonya LENY SOFIANTI,** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 110 dan **Nyonya ANNEKE SENOADJI,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Nyonya LENY SOFIANTI yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 110. ----------

111. **PT. PC24 TELEKOMUNIKASI INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh **Tuan TEDI SUPARDI MUSLIH,** bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan pada angka 111 dan **Tuan ARIEF FEBRIANTARA** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan NOVA ISMAIL** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 111. ----------

112. **PT. PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA (PGASCOM),** berkedudukan di ---------- Jakarta Barat diwakili oleh **Tuan MIFTAKHUL KHOIR,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 02-12-2015 (dua Desember limabelas Aprilduaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Nyonya SRI BUDI MAYANINGSIH** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 112.----------

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 113 Jakarta 12520

113. **PT. PIKA MEDIA KOMUNIKA,** berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh **Tuan R. MADE WIDYASTONO** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama ------ Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 113 dan **Tuan RIBUT FAJARIYANTO,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember limabelas Aprilduaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan R. MADE WIDYASTONO** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 113. ----------

114. **PT. PLATINUM NETWORK INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh **Tuan BENYAMIN P NAIBAHO** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 114 dan **Nyonya DEBBY ELLEN LANGI** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BENYAMIN P NAIBAHO** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 114. ----------

115. **PT. POLARISNET**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan LAILUN SYUKRON** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 115 dan **Tuan BUDHI WIJAYA** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 11-12-2015 (sebelas Desember limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan LAILUN SYUKRON** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 115. ----------

116. **PT. POWER TELECOM**, berkedudukan di Jakarta Barat, diwakili oleh **Nyonya URAY IDASRI HARYANI,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan DICKY TJOKROSAPUTRO** tersebut yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama demikian sah mewakili Perseroan Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 116. ----------

117. **PT. PRESTASI PIRANTI INFORMASI**, berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh ---- **Tuan STEVE HERRY HENDRAWAN dan Tuan YOHAN ISWADI keduanya** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan JIMIN** tersebut yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 117.----------

118. **PT. QIANDRA INFORMATION TECHNOLOGY**, berkedudukan di Jakarta Selatan, ------ diwakili oleh **Tuan ANDA RIVANDA,** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -- Perseroan demian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 118. ----------

119. **PT. RABIK BANGUN PERTIWI,** berkedudukan di Kuta – Bali, diwakili oleh **Tuan** -------- **ZULFADLY SYAM** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 119. ----------

120. **PT. RAHAJASA MEDIA INTERNET**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan AUDWIN P HARDY HARYONO,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ROY RAHAJASA YAMIN** tersebut yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 120. ----------

121. **PT. REKAJASA AKSES,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan ADHI SAFRIANSYAH dan Tuan SETIABUDI HARTAWAN** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 04-12-2015 (empat Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan AGUNG SATYA WIGUNA** tersebut yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 121. ----------

122. **PT. SANO KOMUNIKASI**, berkedudukan di Singaraja, diwakili oleh **Tuan ANDHY SABLI TAGIJARA**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 122. ----------

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

123. **PT. SARANA MEDIATAMA INDONESIA**, berkedudukan di Kota Balikpapan, diwakili oleh **Tuan HERU SETIAWAN** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 123 dan **Tuan HANDITYA PRADANA PUTRA**, bertindak selaku kuasa dari Tuan HERU SETIAWAN dari dan oleh karena itu untuk dan nama Perseroan pada angka 123. ----------

124. **PT. SARANA MUKTI ADIJAYA,** berkedudukan di Jakarta Timur, diwakili oleh **Tuan MUHARDI**, bertindak bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 04-12-2015 (empat Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan MEIDITOMO SUTYARJOKO** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 124. ----

125. **PT. SARANA INSAN MUDA SELARAS,** berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh -- **Tuan ARDIANTO DAMARDONO, Sarjana Teknik,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan GUGUN YUDINAR,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 125. ----------

126. **PT. SATATA NEKA TAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan,** diwakili oleh **Tuan BUDI SETYONO, Sarjana Science,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 126. ----------

127. **PT SATELIT MULTIMEDIA INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Tuan BENYAMIN LUNAERA GAVUR,** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-12-2015 (delapan Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BOGI WITJAKSONO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 127. ----------

128. **PT. SEKAWAN GLOBAL KOMUNIKA**, berkedudukan di Purwokerto, diwakili oleh **Tuan ADI PRATOMO dan Tuan MARYSKA DANU PRASETYO,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan**

BUNTORO KADARUSMAN, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 128. ----------

129. **PT. SELARAS CITRA TERABIT,** berkedudukan di Kota Magelang, yang diwakili oleh --- **Tuan ROZAQ ARIF ROFIAN** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama ---------- Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 129.----------

130. **PT SIMAYA JEJARING MANDIRI**, berkedudukan di Bandung, yang diwakili oleh **Tuan ASEP BUDIARSA,** yang dalam jabatannya bertindak selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 130 dan **Tuan ANDRI HENDRAYANA,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 03-12-2015 (tiga Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan ASEP BUDIARSA, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 130. ----------

131. **PT. SINERGI SEMESTA TELEMATIKA**, berkedudukan di Surabaya, diwakili oleh **Nona EKA RACHMAWATI dan Nona INDAH AYU PUTRI,** keduanya bertindak ----- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan TEDJO BASKORO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 131. ----------

132. **PT. SISTELINDO MITRALINTAS**, berkedudukan di Jakarta Barat, diwakili oleh **Tuan - TEDDY INDRAWAN,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01-12-2015 --------- (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Nyonya LAURENTIA LOTUS** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 132. ----------

133. **PT SMART MEDIA PRATAMA**, berkedudukan di Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili --- oleh **Tuan ANDY PRADHANA** dan **TUAN YUDI PRANOTO,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember dua ribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan JOHAN WIRAWAN,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 133. ----------

134. **PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk,** berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan KUN SETIA IRIANTO,** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 09-12-2015 (Sembilan Desember dua ribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan MERZA FACHYS,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 134. ----------

135. **PT. SMARTLINK GLOBAL MEDIA,** berkedudukan di Surakarta, diwakili oleh --------- **Tuan AGUS WISNUGROHO, S.Si** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 135 dan **Nyonya ULIN NIKMAH,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember dua ribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan AGUS WISNUGROHO, S.Si, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 135. ----------

136. **PT SOLO JALA BUANA,** berkedudukan di Surakarta, yang diwakili oleh **Tuan T. SUNU PRASETYA, Sarjana Hukum,** yang dalam jabatannya bertindak selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 139 dan **Nyonya ANASTASIA WENING SINTA HAPSARI,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember dua ribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan T. SUNU PRASETYA, Sarjana Hukum, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka136. ----------

137. **PT. STARCOM SOLUSINDO**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan MUHAMMAD DIPA PERMANA MANOREK**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 11-12-2015 (sebelas Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan BUDHY ERLANGGA SENDJAJA, Sarjana Teknik, Magister Teknik**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 137. ----------

138. **PT. SUMATERA GLOBAL MEDIATEK,** berkedudukan di Pekan Baru, diwakili oleh ----- **Tuan HENDRIWANTO dan Nyonya TRESNA KUSUMA BRATA** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan DAHLUN ARIFIN HARAHAP** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 138.----------

139. **PT. SUMBER DATA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh **Tuan TOMMY BARANDI** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas Perseroan pada angka 139.----------

140. **PT. SUMIDHAZ PERMATA BUNDA**, yang berkedudukan di Pekanbaru, Riau, diwakili oleh **Tuan DIDI WINARSYAH,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 140. ----------

141. **PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA,** berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh **Tuan YUDIE HARYANTO** dan **Tuan ARMAN BUDIAWAN** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 02-12-2015 (dua Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan KRISTIAN KAWIRAN** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 141. ----------

142. **PT. TELEMEDIA DINAMIKA SARANA**, berkedudukan di Jakarta Barat, diwakili oleh ----- **Tuan CECEP YUDI SUBIANTORO,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ---- Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 142.----------

143. **PT. TIME EXCELINDO**, berkedudukan di Depok, Kabupaten Sleman, diwakili oleh **Tuan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Komunikasi, M.Eng,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 143 dan **Tuan SUGENG RIADI Magister Komunikasi,** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Komunikasi, M.Eng**, yang

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 143.-----

144. **PT. TOTAL INFO KHARISMA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan SIRIO ALFA SENTAURI** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 144 dan **Tuan MUHAMMAD ARIF**, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 04-12-2015 (empat satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan SIRIO ALFA SENTAURI**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 144.----------

145. **PT. TRANS HYBRID COMMUNICATION,** berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan ADE SURYA SAPUTRA**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 02-12-2015 (dua Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan M. FIDELIS TEDJA SURYA,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demkian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 145. ----------

146. **PT. TRANSDATA SEJAHTERA,** berkedudukan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas,-- diwakili oleh **Tuan SYAIFUL HAKIM dan Tuan M IRFAN BAHTIAR,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan DJATI KUSUMO WIDJOYO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 146.----------

147. **PT. TRANSKON JAYA**, berkedudukan di Balikpapan-Kalimantan Timur, diwakili oleh --- **Tuan RAHADI BUDIMAN,** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan ------- tertanggal 05-12-2015 (lima Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan HADI SUKANTO**, yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 147. ---

148. **PT. TRANSMEDIA INDONESIA,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh --------- **Tuan TEDDY AFFAN PURWADI,** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh

karena itu untuk dan atas nama **Tuan BINTANG JULIARSO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 148. ----------

149. **PT. TUJUH DELAPAN SEMBILAN NET,** berkedudukan di Balikpapan, diwakili oleh **Nyonya WIDIAWATY dan Nona SAFIRA ANIS LATIFA,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, masing-masing dan berturut-turut tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dan 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan FAJRI NUR RAHMAN,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 149. ----------

150. **PT. UNINET MEDIA SAKTI,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan** ------ **MOCHAMAD RIDWAN dan Tuan DARMAN SITHIO,** keduanya bertindak -------- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 01-12-2015 --- (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan LW HERMAWAN,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan olehkarena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 150. ----------

151. **PT. UNINET MEDIA SAKTI,** pada angka 150 **(untuk ijin usaha NAP)** diwakili oleh **Tuan NAPTALI,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan LW HERMAWAN,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 150.----------

152. **PT. UNION ROUTELINK COMMUNICATION**, berkedudukan di Kota Yogyakarta, diwakili oleh **Tuan BAMBANG NURCAHYO dan Tuan PUHUT BASUKI**, keduanya bertindak dalam jabatan mereka selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 152. ----------

153. **PT. USAHA MEDIANTARA INTRANET**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Nona CHENALIA AULINA AC** berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 11-12-2015 (sebelas Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu

HIZMELINA, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Kebagusan Raya No. 79 Jakarta 12520

untuk dan atas nama **Tuan HENDRIK CHANDRA WIRATNO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 153.----------

154. **PT. VARNION TECHNOLOGY SEMESTA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili **Tuan LEONARDUS HANDY GUNAWAN,** dan **Tuan ANGGORO DANU KARTIKO** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan ALEXANDER BUDIMAN,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 154. ----

155. **PT. VELTRATEL,** berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **Tuan ANDRI – NARTAWIJAYA dan Nyonya NUR AINI MUSTIKASARI,** keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan masing-masing dan berturut-turut, tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dan tanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan Insinyur EKO YUWONO,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 155. ----------

156. **PT. WAHANA LINTAS NUSA PERSADA**, berkedudukan di Kabupaten Sleman, diwakili oleh **Tuan MARTINUS BAMBANG WIJAYANTO dan Tuan YOGI ARI SUDEWO**, keduanya keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 01-12-2015 (satu Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan Insinyur SYAFIQ IQBAL,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan tersebut pada angka 156. ----------

157. **PT. WIFIKU INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh **Tuan ARTANTO SALIM** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dan **Nyonya NATALIA SUTANTO,** bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan, keduanya bersama-sama bertindak dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 157. ----------

158. **PT. WIRELESS INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **Tuan R TONNY HARTONO,** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah

tangan tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan HENDRA KARNADI,** yang dalam Surat Kuasa tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan pada angka 158. ----------

-Surat Kuasa – Surat Kuasa mana aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini.
-Bahwa MUNAS telah menghasilkan ketetapan-ketetapan/keputusan-keputusan yang terdiri dari 4 (empat) ketetapan/keputusan yaitu : ----------

1). Ketetapan Nomor 001/TAP/MUNASLUB/XII-14/2015 tentang QUORUM MUSYAWARAH - NASIONAL LUAR BIASA yang telah didaftarkan oleh ERI ARYANTO, Sarjana Hukum, ---- Magister Science, Notaris di Kabupaten Sleman tertanggal 14-12-2015 (empatbelas -------- Desember duaribu lima belas) Nomor 274/W/XII/2015 . ----------

2). Ketetapan Nomor 002/TAP/MUNASLUB/XII-14/2015 tentang TATA TERTIB DAN -------- AGENDA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA. yang telah didaftarkan oleh ERI ------ ARYANTO, Sarjana Hukum, Magister Science, Notaris di Kabupaten Sleman tertanggal -- 14-12-2015 (empatbelas Desember duaribu limabelas) Nomor 276/W/XII/2015 ----------

3). Ketetapan Nomor 003/TAP/MUNASLUB/XII-4/2015 tentang HASIL-HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA, yang telah didaftarkan oleh ERI ARYANTO, Sarjana Hukum, --- Magister Science, Notaris di Kabupaten Sleman tertanggal 14-12-2015 (empatbelas -------- Desember duaribu limabelas) Nomor 277/W/XII/2015 . ----------

4). Ketetapan Nomor 004/TAP/MUNASLUB/XII-14/2015 tentang KUASA MENCATATKAN ---- HASIL MUNASLUB APJII 2015 KE NOTARIS yang telah dilegalisir oleh ERI ARYANTO, Sarjana Hukum, Magister Science, Notaris di Kabupaten Sleman, tertanggal 14-12-2015 (empatbelas Desember duaribu limabelas) Nomor : 932/Leg/XII/2015.. ----------

-Bahwa Penghadap dalam kedudukannya tersebut bermaksud mengaktakan salah satu ketetapan MUNASLUB APJII tahun 2015 tersebut yaitu ketetapan Nomor ------- 003/TAP/MUNASLUB/XII-14/2015 mengenai Hasil Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa -- dengan keputusan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII sebagai Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII Tahun 2015 dan dengan demikian mengubah seluruh Angaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar APJII yang dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris tertanggal 31-08-2012 (tigapuluh satu Agustus duaribu duabelas) Nomor 30 dan Nomor 31.----------

-Bahwa penghadap dengan akta ini bermaksud mengaktakan perubahan Anggaran Rumah

Tangga APJII sedangkan perubahan Anggaran Dasar APJII telah dituangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal hari ini Nomor 10. ----------
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penghadap yang tetap bertindak ----------
sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan dalam akta ini Ketetapan/Keputusan MUNASLUB mengenai perubahan Anggaran Rumah Tangga APJII sebagai berikut : ----------

----------RANCANGAN----------

----------ANGGARAN RUMAH TANGGA ----------

----------ASOSIASI PENYELENGGARA JASAINTERNET INDONESIA----------

---------- BAB I ----------

---------- KETENTUAN UMUM ----------

---------- Pasal 1 ----------

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar. ----------
2. Walaupun bersifat pelengkap, Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar. ----------

---------- BAB II ----------

---------- NAMA ASOSIASI, LAMBANG DAN PEMAKAIANNYA ----------

---------- Pasal 2 ----------

1. Nama lengkap organisasi adalah sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar, ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA selanjutnya disingkat APJII. ----------
2. Aturan pemakaian namadan singkatan serta lambing diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus APJII.----------

---------- BAB III ----------

---------- RUANG LINGKUP KEGIATAN ----------

---------- Pasal 3 ----------

Ruang lingkup kegiatan APJII meliputi: ----------

1. Berpartisipasi aktif dalam penyusunan regulasi pengaturan tata kelola dan tata niaga Industri Internet yang mendorong. perkembangan dan pertumbuhan industri Internet. -------
2. Melakukan kajian-kajian mengenai perkembangan dan pertumbuhan Internet.----------
3. Pengembangan Indonesia Internet *eXchange* dan keamanan Jaringan. ----------
4. Penyelenggaraan layanan-layanan *National Internet Registry (NIR)* dan kajian-kajian yang berhubungan dengan Internet. ----------

5. Pelatihan-pelatihan teknis dan penerbitan sertifikasi profesi Internetsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
6. Kerjasama dengan institusi-institusi terkait baik dalam maupun luar negeri. ----------
7. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan Industri Internet baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang sejalan dengan tujuan dan kepentingan organisasi. -----

---------- **BAB IV** ----------

----------**KEANGGOTAAN** ----------

----------**Bagian Kesatu** ----------

----------**Syarat Keanggotaan** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

Anggota APJII adalah: ----------

1. Anggota Penyelenggara APJII adalah Institusi yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Telekomunikasi dari Pemerintah Republik Indonesia. ----------
2. Anggota IDNIC-APJII adalah Individu, Instansi pemerintah, Perusahaan berbadan hukum dan organisasi berbadan hukum yang mendapatkan Nomor Protokol Internet, dan atau sesuai peraturan pemerintah terkait pengelolaan Nomor Protokol Internet. ----------
3. Anggota Penyedia Teknologi adalah Institusi penyedia hardware/software/system berbasis Internet baik lokal maupun global. ----------

---------- **Pasal 5** ----------

Ketentuan mengenai teknis pendaftaran keanggotaan diatur lebih lanjut dalam peraturan asosiasi. ----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

----------**Tanda dan Iuran Keanggotaan**----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Setiap Anggota yang sudah diterima dan terdaftar akan menerima Tanda Keanggotaan APJII. ----------
2. Tanda Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII. ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Iuran yang wajib dibayar anggota adalah sesuai dengan type keanggotaan. ----------
2. Iuran Keanggotaan Penyelenggara adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. ----------
3. Iuran Keanggotaan IDNIC APJII ditentukan dalam IDNIC APJII *Open Policy Meeting* yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Asosiasi. ----------

5. Pelatihan-pelatihan teknis dan penerbitan sertifikasi profesi Internetsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
6. Kerjasama dengan institusi-institusi terkait baik dalam maupun luar negeri. ----------
7. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan Industri Internet baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang sejalan dengan tujuan dan kepentingan organisasi. -----

---------- **BAB IV** ----------

----------**KEANGGOTAAN** ----------

----------**Bagian Kesatu** ----------

----------**Syarat Keanggotaan** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

Anggota APJII adalah: ----------

1. Anggota Penyelenggara APJII adalah Institusi yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Telekomunikasi dari Pemerintah Republik Indonesia. ----------
2. Anggota IDNIC-APJII adalah Individu, Instansi pemerintah, Perusahaan berbadan hukum dan organisasi berbadan hukum yang mendapatkan Nomor Protokol Internet, dan atau sesuai peraturan pemerintah terkait pengelolaan Nomor Protokol Internet. ----------
3. Anggota Penyedia Teknologi adalah Institusi penyedia hardware/software/system berbasis Internet baik lokal maupun global. ----------

---------- **Pasal 5** ----------

Ketentuan mengenai teknis pendaftaran keanggotaan diatur lebih lanjut dalam peraturan asosiasi. ----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

----------**Tanda dan Iuran Keanggotaan**----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Setiap Anggota yang sudah diterima dan terdaftar akan menerima Tanda Keanggotaan APJII. ----------
2. Tanda Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII. ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Iuran yang wajib dibayar anggota adalah sesuai dengan type keanggotaan. ----------
2. Iuran Keanggotaan Penyelenggara adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. ----------
3. Iuran Keanggotaan IDNIC APJII ditentukan dalam IDNIC APJII *Open Policy Meeting* yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Asosiasi. ----------

4. Iuran Keanggotaan Penyedia Teknologi ditentukan dalam IDNIC APJII *Open Policy Meeting* yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Asosiasi. ----------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **Hak Dan Kewajiban Anggota Asosiasi** ----------

---------- **Paragraf 1** ----------

---------- **Hak Anggota** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

Anggota mempunyai hak: ----------

1. Anggota mempunyai hak untuk berpendapat, usul dan berbicara sesuai dengan kategori keanggotaan dan tata tertib asosiasi. ----------
2. Anggota berhak mendapatkan fasilitas asosiasi sesuai dengan kategori keanggotaan.------
3. Anggota berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan asosiasi sesuai kategori keanggotaan. ----------
4. Anggota berhak mengakses informasi mengenai perkembangan organisasi dan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh asosiasi. ----------

---------- **Pasal 9** ----------

Kewajiban Anggota: ----------

1. Anggota wajib menjaga nama baik APJII.----------
2. Anggota wajib mematuhi semua peraturan dan tata tertib APJII. ----------
3. Anggota wajib mendukung program-program kerja APJII. ----------
4. Anggota wajib membayar iuran keanggotaan sesuai dengan kriteria keanggotaan. ----------
5. Anggota wajib membayar biaya atas fasilitas bersama yang dimanfaatkan. ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Ketentuan mengenai tata tertib asosiasi diatur dalam Peraturan Asosiasi. ----------
2. Hak dan Kewajiban yang belum diatur dalam AD/ART, dapat diatur dalamperaturan asosiasi. ----------

---------- **Bagian Keempat** ----------

----------**Sanksi Asosiasi** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

Setiap Anggota yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan APJII dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa: ----------

1. Teguran resmi dalam bentuk peringatan tertulis dari Dewan Pengurus.----------
2. Penghentian pelayanan asosiasi yang semula merupakan hak sebagai Anggota. ----------
3. Pemberhentian sebagai Anggota secara tertulis dan diumumkan kepada seluruh Anggota.

Bagian Kelima

Pemberhentian Keanggotaan

Paragraf 1

Kehilangan Status Keanggotaan Bagi Anggota

Pasal 12

Status keanggotaan Anggota dapat hilang, karena:

1. Khusus bagi Anggota Penyelenggara dalam hal Ijin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan.
2. Menghentikan usahanya/menutup perusahaan atau tidak dapat lagi mewakili perusahaan dalam keanggotaan APJII.
3. Apabila setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara tertulis dan terus menerus tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota.
4. Merugikan atau mencemarkan nama baik APJII.
5. Kehilangan keanggotaan karena melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di APJII.
6. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

Paragraf 2

Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 13

1. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dan atau laporan serta pembuktian yang tersedia, maka Dewan Pengurus dapat melakukan pemberhentian keanggotaan secara tetap atau sementara.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan pemanggilan terhadap terlapor.
3. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk didengar keterangan dan penjelasannya.
4. Hasil pemanggilan ini merupakan kesimpulan akhir terhadap usulan pemberhentian keanggotaan.
5. Kepada yang bersangkutan akan diberikan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan yang disahkan oleh Ketua Umum berdasarkan kesimpulan akhir yang diperoleh Dewan Pengurus.
6. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan diberikan selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak pemanggilan terakhir dilaksanakan.

Paragraf 3

Surat Tanda Keanggotaan Dan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 14

1. Surat Tanda Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII.
2. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
3. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan harus dilampiri sekurang-kurangnya Berita Acara Hasil Pemanggilan yang ditandatangani lengkap sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 12 ayat (3).
4. Bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan, maka Surat Tanda Keanggotaan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi, demikian pula hak dan kewajibannya sebagai anggota APJII.-

BAB V

FASILITAS

Bagian Kesatu

IIX-APJII

Pasal 15

1. Pengelolaan Fasilitas Indonesia *Internet Exchange* (IIX) dilaksanakan oleh suatu bidang dalam Dewan Pengurus.
2. Bidang tersebut berpedoman kepada prinsip kebersamaan, kemitraan, tidak bersaing dengan Anggota, netral, nir-laba atau tidak semata-mata mencari keuntungan, profesional dan independen, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota.
3. Fasilitas IIX adalah layanan interkoneksi Nasional antar anggota.
4. Pemilihan lokasi dimana IIX berada harus memenuhi kriteria tertentu yang diajukan oleh perwakilan wilayah dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
5. Pengelolaan IIX berada sepenuhnya dibawah tanggung jawab dan kendali APJII melalui Ketua Bidang terkait.
6. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengoperasian IIX ditetapkankan di dalam *Open Policy Meeting* yang akan dijelaskan dalam Peraturan Asosiasi.

Bagian Kedua

IDNIC-APJII

Pasal 16

1. APJII bekerja sama dengan badan-badan dunia yang mengelola Penomoran Protokol Internet (PI) atau *Autonomous System Number* (ASN). ----------
2. APJII menerima mandat sebagai *National Internet Registry* (NIR) dari badan Sumber Daya Internet Regional untuk mengalokasikan Penomoran PI dan ASN bagi masyarakat pengguna Internet di Indonesia. ----------
3. Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) di atas, dikelola oleh unit yang disebut *Indonesia Network Information Center* (IDNIC-APJII). ----------
4. Unit IDNIC-APJII mempunyai tugas: ----------
   a. membantu melakukan kajian-kajian berhubungan dengan arah kebijakan Pengelola Nomor PI Nasional; ----------
   b. membantu merumuskan kebijakan umum pengelolaan Penomoran PI di Indonesia untuk ditetapkan oleh Pemerintah; ----------
   c. melakukan mediasi dan advokasi antara Pengelola Lokal Nomor PI *(Local Internet Registry)*dengan Pengguna Alamat PI. ----------
5. Usulan Kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam pengelolaan Nomor PI Nasional diputuskan di dalam IDNIC APJII *Open Policy Meeting* yang kemudian diajukan kepada Forum Kebijakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ----------
6. Hal-hal mengenai tugas dan fungsi unit IDNIC-APJII diatur dalam Peraturan Asosiasi.-------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

----------**NOC-APJII** ----------

---------- **Pasal 17** ----------

1. APJII membuat fasilitas data center bersama yang disebut layanan NOC-APJII. ----------
2. Fasilitas data center bersama ini dapat digunakan oleh Anggota Penyelenggara;----------
3. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam layanan NOC-APJII diputuskan di dalam ------ *Open Policy Meeting* yang akan dijelaskan dalam Peraturan Asosiasi. ----------

---------- **Bagian Keempat** ----------

---------- **Sertifikasi dan Pelatihan** ----------

---------- **Pasal 18** ----------

1. Guna mendukung kemajuan dan professionalisme di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perlu dinyatakan dalam suatu Sertifikat yang sah dan berlaku secara nasional, regional dan internasional dengan bekerja sama dengan beberapa mitra penyedia teknologi. ----------

2. Layanan Sertifikasi mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dikerjasamakan dengan beberapa mitra penyedia teknologi. ----------

3. Kegiatan Layanan Sertifikasi adalah meliputi: ----------
   a. Menyusun dan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi;----------
   b. Menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK); ----------
   c. Melakukan pengujian Sertifikasi di bidang TIK; ----------
   d. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi. ----------

4. Tugas, Fungsi dan Kebijakan yang diterapkan dalam layanan sertifikasi diatur dalam Peraturan Asosiasi. ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Guna mendukung kemajuan dan professionalisme di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perlu dilakukan pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi di industri internet .----------

2. Kegiatan Layanan Pelatihan meliputi: ----------
   a. Mengembangkan, menyusun dan menetapkan kerja sama pelatihan.----------
   b. Melakukan pendidikan terhadap instruktur di dalam lingkungan anggota APJII. ----------
   c. Menyusun dan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi; ----------
   d. Menyusun petunjuk teknis pelatihan; ----------
   e. Melakukan pelatihan di bidang TIK; ----------
   f. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan. ----------

3. Tugas, Fungsi dan Kebijakan yang diterapkan dalam layanan pelatihandiatur dalam Peraturan Asosiasi. ----------

---------- **BAB VI** ----------

---------- **ORGANISASI**----------

---------- **Bagian Kesatu** ----------

---------- **Hubungan Jenjang Struktur Asosiasi** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

1. Dewan Pengawas adalah perwakilan Anggota yang berfungsi mengawasi Dewan Pengurus dalam melaksanakan hasil Musyawarah Nasional. ----------
2. Dewan Pengurus adalah pelaksana hasil Musyawarah Nasional. ----------
3. Badan Pelaksana Harian merupakan badan pelaksana operasional APJII yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. ----------

4. Kelompok Kerja dan kelompok lainnya dapat dibentuk atas prakarsa dan keputusan Dewan Pengurus sesuai dengan kebutuhan. ----------
5. Uraian jabatan dan penjelasan lainnya dari setiap Anggota Dewan Pengurus, Badan Pelaksana Harian dan kelompok kerja yang dibentuk, ditetapkan dengan peraturan asosiasi. ----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **Sumber Daya Internet** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

1. Sumber daya internet terdiri atas: ----------
   a. Nomor Protokol Internet (Nomor PI) ----------
   b. Nama Domain ----------
2. APJII bekerjasama dengan badan-badan Nasional, Regional dan Internasional dalam tata kelola Internet. ----------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **Nomor Protokol Internet** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

1. APJII bekerjasama dengan badan-badan dunia yang mengelola *Internet Protocol* (IP) *Address* dan *Autonomus System Number* (ASN).----------
2. APJII menerima mandat sebagai *National Internet Registry* (NIR) dari badan Sumber Daya Internet regional untuk mendistribusikan IP Addressdan ASN bagi masyarakat pengguna Internet di Indonesia. ----------

----------**Bagian Keempat** ----------

---------- **Nama Domain** ----------

---------- **Pasal 23** ----------

1. APJII wajib bekerjasama dengan badan-badan dunia yang mengelola Nama Domain(*Domain Name*). ----------
2. *Registrar* DNS DTD di Indonesia yang dikelola oleh APJII adalah terbatas pada *Registrar* "net.id".----------
3. APJII dapat menjadi *Registry* untuk Domain Tingkat Tinggi generik (g-TLD) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Internasional. ----------
4. Mengawal tata kelola Domain Tingkat Tinggi .id (*cc-TLD .id*) dengan berperan aktif sebagai anggota Forum Nama Domain Internet Indonesia (FANDI) dan sebagai Anggota Representasi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). ----------

5. Menjalankan APJII sebagai registrar net.id yang sudah disepakati dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). ----------
6. Mendorong agar anggota yang memenuhi syarat dapat menjadi registrar nama domain .id
7. Bekerja sama dengan pengelola *rootserver*. ----------

---------- **Bagian Kelima** ----------

----------**Pelaksana Penagihan** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

Badan Pelaksana Harian menjalankan fungsi sebagai pelaksana penagihan untuk seluruh fasilitas bersama APJII yang disebutkan dalam BAB VIII Pasal 14 Anggaran Dasar. ----------

----------**BAB VII**----------

----------**KEPENGURUSAN** ----------

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**Dewan Pengawas**----------

----------**Paragraf 1** ----------

---------- **Hak dan Kewajiban Anggota DewanPengawas** ----------

----------**Pasal 25** ----------

Hak Anggota Dewan Pengawas:----------

1. Mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pengurus ----------
2. Memilih dan dipilih untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dalam struktur Dewan Pengawas. ----------
3. Mendapatkan dukungan administratif dalam rangka menjalankan fungsi Dewan Pengawas. ----------

---------- **Pasal 26** ----------

Anggota Dewan Pengawas mempunyai Kewajiban: ----------

1. Memegang teguh dan mengamalkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. ----------
2. Melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam asosiasi.----------
3. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas.----------
4. Mendahulukan kepentingan asosiasi di atas kepentingan pribadi, kelompok, dangolongan.
5. Memperjuangkan kepentingan anggota asosiasi.----------
6. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Dewan Pengurus.----------

---------- **Pasal 27** ----------

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Anggota Dewan Pengawas diatur dalam peraturan Dewan Pengawas tentang tata tertib. ----------

---------- **Paragraf 2** ----------

Pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 28

1. Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai Anggota Dewan Pengurus.
2. Anggota Dewan Pengawas dilarang melanggar Tata Tertib Dewan Pengawas.
3. Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebanyak 3 kali berturut-turut atau 5 kali dalam satu periode kepengurusan dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.
4. Keputusan pemberhentian Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
5. Tata cara pemberhentian Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas tentang Tata Tertib.

Bagian Kedua

Dewan Pengurus

Paragraf 1

Bidang dan Unit

Pasal 29

1. Bidang dibentuk oleh Ketua Umum Asosiasi yang terdiri dari namun tidak terbatas pada Unit IDNIC APJII, Bidang IIX, Bidang Sertifikasi, dan Bidang Regulasi dan Advokasi
2. Bidang sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh satu orang Ketua Bidang.
3. Unit IDNIC sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh satu orang Ketua IDNIC.
4. Ketua Bidang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Asosiasi.
5. Ketua IDNIC diangkat dan diberhentikan dalam Rapat khusus dan di tetapkan serta dikukuhkan oleh Ketua Umum Asosiasi.
6. Ketua Umum menetapkan jumlah bidang berserta keanggotaannya pada permulaan Rapat Pengurus yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus.
7. Fungsi Bidang dan Unit IDNIC:
   a. Menjalankan layanan APJII sesuai dengan Tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Asosiasi;
   b. Menjalankan program kerja yang telah diputuskan baik dalam Musyawarah Nasional maupun diputuskan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan bidang atau unit tugasnya.
8. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bidang-bidang dan Unit IDNIC dapat mengadakan pertemuan konsultatif dengan Dewan Pengawas.
9. Ketua Bidang dan unit membuat laporan kerja pada akhir masa keanggotaan Dewan Pengurus, baik yangsudah maupun yang belum terselesaikan.

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Bidang dan unit diatur dengan Peraturan Asosiasi tentang Tata Tertib Dewan Pengurus. ----------

---------- **Paragraf 2** ----------

---------- **Hak dan Kewajiban** ----------

---------- **Pasal 30** ----------

Hak Anggota Dewan Pengurus: ----------

1. Mengajukan usul pelaksanaan program kerja. ----------
2. Mendapatkan dukungan administratif dalam rangka menjalankan fungsi Dewan Pengurus.-

---------- **Pasal 31** ----------

Anggota Dewan Pengurus mempunyai Kewajiban: ----------

1. Memahami dan menjalankan Angaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga. ----------
2. Melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Asosiasi. ----------
3. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus. ----------
4. Mendahulukan kepentingan asosiasi di atas kepentingan pribadi, kelompok, dangolongan.
5. Melaksanakan Program Kerja yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional. --------
6. Memperjuangkan kepentingan anggota asosiasi. ----------
7. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Dewan Pengurus. ----------

---------- **Pasal 32** ----------

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Umum, Bendahara, dan Ketua Bidang serta Unit IDNIC-APJII diatur dengan Peraturan Asosiasi tentang Tata Tertib Dewan Pengurus. ----------

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **Persyaratan Dewan Pengurus Dan Dewan Pengawas** ----------

---------- **Pasal 33** ----------

1. Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut : ----------
   a) Warga Negara Republik Indonesia yang sah. ----------
   b) Pemilik/Direktur/Karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan yang menjadi anggota. ------
   c) Tidak pernah terlibat dengan organisasi terlarang. ----------
   d) Memiliki dedikasi dan komitmen kepada APJII. ----------
   e) Berdomisili dan berusaha di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. ----------
2. Menyatakan secara tertulis bersedia sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 28 Anggaran Dasar. ----------

3. Dipilih dalam Musyawarah Nasional berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------
4. Ketua Umum hanya diperkenankan memangku jabatan sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) kali masa jabatan kepengurusan berturut-turut; 1 (satu) masa kerja kepengurusan adalah selama 3 (tiga) tahun. ----------
5. Seorang Anggota Dewan Pengawas hanya diperkenankan memangku jabatan sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) kali masa kerja kepengurusan berturut-turut; 1 (satu) masa kerja kepengurusan adalah selama 3 (tiga) tahun. ----------
6. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud dalam Bab IX Pasal 46 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ini, maka masa kerja kepengurusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas diperpanjang hingga terlaksananya Musyawarah Nasional. ----------
7. Dewan Pengurus melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Anggaran Dasar serta keputusan-keputusan Musyawarah Nasional. ----------
8. Fungsi Dewan Pengurus diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar dengan wewenang sebagai berikut : ----------
   a) Menjabarkan garis-garis besar program kerja yang ditetapkan menjadi program kegiatan kerja yang praktis untuk dapat dilaksanakan di lapangan. ----------
   b) Melakukan pemantauan terhadap dinamika anggota agar tetap sejalan dengan kebijakan umum, dan memberikan pertimbangan dan saran-saran mengenai pembinaannya. ----------
   c) Mengakomodir aspirasi Anggota dengan menghasilkan bentuk nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh Anggota secara adil merata dan transparan. ----------
   d) Menyusun dan menetapkan kebijakan serta pelaksanaan program kerja dan layanan -- APJII. ----------
   e) Menyelenggarakan hubungan dengan pihak luar yang memberikan manfaat bagi organisasi. ----------
   f) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Umum, dan Bendahara memiliki wewenang untuk membuka rekening Bank dan menandatangani giral Bank berupa Cek/Bilyet Giro dan surat-surat lain yang diperlukan oleh Pihak Bank atas Rekening Bank APJII. ----------

---------- **Bagian Keempat** ----------

---------- **Tata Kerja Dewan Pengurus Dan Dewan Pengawas** ----------

---------- **Pasal 34** ----------

1. Untuk pertama kali Dewan Pengurus menetapkan program kerja tahunan yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (APPA) untuk disetujui oleh

Dewan Pengawas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender dari terbentuknya Dewan Pengurus.

2. Dewan Pengawas menetapkan program kerja tahunan yang dilengkapi dengan RAB yang diterima dari Dewan Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Dewan Pengurus terbentuk.
3. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terbentuknya Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Tertib Kerja Kepengurusannya, yang paling sedikit berisikan:
   a. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab setiap Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
   b. Mekanisme Organisasi dan Tata Tertib Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
   c. Tolok Ukur Unjuk kerja masing-masing Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
   d. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
   e. Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
   f. Rapat Dewan Pengawas bersama dengan Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota Dewan Pengurus

Pasal 35

1. Anggota Dewan Pengurus dilarang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengurus sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 7 (tujuh) kali dalam satu periode kepengurusan.
2. Anggota Dewan Pengurus dilarang melanggar Tata Tertib Dewan Pengurus.
3. Anggota Dewan Pengurus yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengurus sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 7 (tujuh) kali dalam satu periode kepengurusan, dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengurus.
4. Dalam hal Ketua Umum tidak menjalankan fungsinya, dapat diberhentikan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan untuk hal pemberhentian dan Pemilihan Ketua Umum.
5. Keputusan pemberhentian Anggota Dewan Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

6. Keputusan pemberhentian Ketua Umum Asosiasi ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa setelah mendengarkan Pembelaan dari Ketua Umum. --
7. Tata cara pemberhentian Anggota Dewan Pengurus diatur dalam peraturan asosiasi tentang tata tertib Dewan Pengurus. ----------

---------- **Bagian Keenam** ----------

---------- **Koordinator Dan Kelompok Kerja** ----------

---------- **Pasal 36** ----------

1. Kelompok Kerja adalah satu kelompok pelaksana yang dapat dibentuk oleh Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan. ----------
2. Ketua Kelompok Kerja adalah Ketua Bidang dan/atau Ketua IDNIC APJII dalam Dewan Pengurus yang mengusulkan kelompok kerja terkait. ----------
3. Aturan kerja, tata komunikasi, program dan biaya kegiatan Kelompok Kerja diatur dalam keputusan Ketua Umum. ----------
4. Setiap Anggota dapat mengikuti kegiatan lebih dari satu Kelompok Kerja. ----------
5. Anggota Kelompok Kerja dapat diminta untuk ikut membiayai kegiatan kelompok yang diikutinya. ----------

---------- **Bagian Ketujuh** ----------

---------- **Penggantian Anggota Dewan Pengurus** ----------

---------- **Dan Dewan Pengawas** ----------

---------- **Pasal 37** ----------

1. Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatannya, apabila: ----------
   a. Mengundurkan diri; ----------
   b. Meninggal dunia; ----------
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga; -
   d. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas sesuai dengan tata tertib kerja kepengurusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga ini. -------
2. Apabila oleh satu sebab atau lebih yang disebutkan dalam ayat (1), Ketua Dewan Pengawas tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa jabatan tersebut, Rapat Dewan Pengawas yang khusus untuk itu wajib memilih Calon Pengganti diantara Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. ----------

3. Agar tidak terjadi kekurangan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar, maka Dewan Pengawas Wajib mengangkat penggantinya sebagai Anggota Dewan Pengawas Paruh Waktu berdasarkan urutan suara hasil pemilihan Anggota Dewan Pengawas dalam Musyawarah Nasional terakhir untuk disahkan oleh Dewan Pengawas. ----------
4. Apabila oleh satu sebab atau lebih yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, Ketua Umum tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa jabatan tersebut, Rapat Dewan Pengawas yang khusus untuk itu dapat memilih Pelaksana Tugas Sementara Ketua Umum (dari Dewan Pengurus berjalan) untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan, dan sudah harus dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk melaksanakan Pemilihan Ketua Umum. ----------
5. Rapat Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (4), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Dewan Pengawas. ----------
6. Apabila oleh satu sebab atau lebih yang disebut dalam ayat (1), Sekretaris Jenderal/Umum dan Bendahara tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Ketua Umum dapat menentukan penggantinya dari Anggota Dewan Pengurus yang ada atau dari Anggota Penyelenggara dan harus mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas. ----------
7. Apabila oleh satu sebab atau lebih yang disebut dalam ayat (1) di atas, Ketua Bidang tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Ketua Umum dapat menentukan penggantinya dari anggota dewan pengurus yang ada atau dari anggota penyelenggara dan harus mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas. ----------
8. Apabila oleh satu sebab atau lebih yang disebut dalam ayat (1) di atas, Ketua Unit IDNIC APJII tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Ketua Umum dapat menentukan penggantinya dari Anggota Dewan Pengurus Unit IDNIC APJII yang ada atau dari anggota IDNIC APJII dan harus mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas. ----------
9. Pergantian pengurus harus dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional selanjutnya. ----------

---------- **Bagian Kedelapan** ----------

---------- **Badan Pelaksana Harian** ----------

---------- **Pasal 38** ----------

1. Badan Pelaksana Harian (BPH) dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pelaksana Harian yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum. ----------

2. Kepala, organisasi dan personalia Badan Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum. ----------
3. Staff Badan Pelaksana Harian wajib profesional, dan tidak diperkenankan mempunyai hubungan kepentingan usaha apapun dengan APJII maupun Anggota APJII. ----------
4. Kriteria dan tata cara pemilihan dan penetapan Kepala BPH adalah sebagai berikut: --------
   a) Kepala BPH adalah seorang profesional yang tidak memiliki perusahaan sejenis dengan perusahaan yang menjadi Anggota APJII, termasuk memiliki saham penuh atau sebagian pada perusahaan yang dimaksudkan. ----------
   b) Kepala BPH adalah seorang profesional yang harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan, serta berkemampuan komunikasi aktif internal maupun eksternal.
   c) Kepala BPH adalah seorang profesional yang mendapatkan hak dan kewajiban ---------- sebagaimana layaknya seorang tenaga kerja sesuai peraturan dan undang-undang ---- tenaga kerja yang berlaku. ----------
   d) Kepala BPH dipilih melalui seleksi khusus yang ditangani secara khusus pula oleh Dewan Pengurus. ----------
5. Tugas-tugas dan tanggungjawab Badan Pelaksana Harian ditetapkan secara terpisah melalui sebuah Surat Keputusan Ketua Umum. ----------

BAB VIII

PEMILIHAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Hak Memilih dan Hak Dipilih

Pasal 39

1. Anggota APJII memiliki hak suara untuk turut serta dalam pemilihan dengan pengaturan -- sebagai berikut: ----------
   a. Anggota APJII yang masuk kedalam kategori Anggota Penyelenggara memiliki hak ---- untuk memilih Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas didalam Musyawarah ----- Nasional. ----------
   b. Anggota APJII yang masuk kedalam kategori Anggota IDNIC APJII memiliki hak untuk memilih Ketua Unit IDNIC APJII dalam Rapat Khusus Unit IDNIC APJII.----------
2. Anggota APJII memiliki hak untuk mengajukan diri kedalam bursa calon dalam pemilihan - dengan pengaturan sebagai berikut: ----------
   a. Anggota APJII yang masuk kedalam kategori Anggota Penyelenggara memiliki hak ---- untuk mengajukan diri kedalam bursa Calon Ketua Umum dan Calon Anggota Dewan Pengawas dalam Musyawarah Nasional. ----------

b. Anggota APJII yang masuk kedalam kategori Anggota IDNIC APJII memiliki hak untuk mengajukan diri kedalam bursa Calon Ketua Unit IDNIC APJII dalam Rapat Khusus — Unit IDNIC APJII. ----------

---------- **Bagian Kedua** ----------

---------- **Pemilih Dan Hak Suara** ----------

---------- **Pasal 40** ----------

1. Setiap Anggota Penyelenggara mempunyai Hak Suara untuk memilih Calon Ketua Umum dan Calon Anggota Dewan Pengawas. ----------
2. Setiap Anggota Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak 1 (satu) suara untuk masing-masing: 1 (satu) orang Calon Ketua Umum dan 7 (tujuh) orang Calon Anggota Dewan Pengawas. ----------
3. Setiap Anggota IDNIC mempunyai Hak Suara untuk memilih Calon Ketua Unit IDNIC APJII. ----------
4. Hak Suara Anggota IDNIC terbagi menjadi: ----------
   a. Setiap Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv4 dengan besaran sampai dengan /22 (*slash* dua puluh dua) mempunyai hak suara sebanyak 2 (dua) suara; ----------
   b. Setiap Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv4 dengan besaran /21 sampai dengan /19 mempunyai hak suara sebanyak 4 (empat) suara; -----
   c. Setiap Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv4 dengan besaran /18 sampai dengan /16 mempunyai hak suara sebanyak 8 (delapan) suara;----
   d. Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv4 dengan besaran /15 sampai dengan /13 mempunyai hak suara sebanyak 16 (enam belas) suara; ----------
   e. Setiap Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv4 dengan besaran /12 sampai dengan /10 mempunyai hak suara sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara; ----------
   f. Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv4 dengan besaran /9 atau lebih mempunyai hak suara sebanyak 64 (enam puluh empat) suara. ----------
   g. Setiap Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv6 dengan besaran sampai dengan /35 mempunyai hak suara sebanyak 2 (dua) suara; ----------
   h. Setiap Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv6 dengan besaran /34 sampai dengan /32 mempunyai hak suara sebanyak 4 (empat) suara; -----
   i. Setiap Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv6 dengan besaran /31 sampai dengan /29 mempunyai hak suara sebanyak 8 (delapan) suara; ---

j. Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv6 dengan besaran /28 sampai dengan /26 mempunyai hak suara sebanyak 16 (enam belas) suara; ----------

k. Setiap Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv6 dengan besaran /25 sampai dengan /23 mempunyai hak suara sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara; ----------

l. Anggota IDNIC yang memiliki Alamat Protokol Internet (PI) IPv6 dengan besaran /22 atau lebih mempunyai hak suara sebanyak 64 (enam puluh empat) suara. ----------

5. Setiap Anggota Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat memberikan hak suara kepada orang lain. ----------

6. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hanya boleh menerima kuasa paling banyak 2 (dua) kuasa dari pemilik suara yang sah. ----------

7. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuktikan dengan Surat Kuasa.

---------- **Bagian Ketiga** ----------

---------- **Calon Dan Pencalonan** ----------

---------- **Pasal 41** ----------

1. Setiap Anggota APJII yang masuk kedalam kategori Anggota Penyelenggara yang memenuhi syarat menjadi Anggota Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas seperti yang diuraikan dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (4) dan ayat (5) Anggaran Rumah Tangga ini, berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas. ----------

2. Setiap Anggota APJII yang masuk kedalam kategori Anggota Penyelenggara berhak mengajukan 1 (satu) orang calon untuk Calon Dewan Pengurus dan/atau Calon Anggota Dewan Pengawas dari institusinya, kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal dan persyaratan pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan. ----------

3. Calon yang sah adalah calon yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah menyampaikan persetujuan pencalonannya kepada Panitia Pemilihan serta telah dinyatakan lolos seleksi oleh Panitia Pemilihan. ----------

4. Panitia Pemilihan menetapkan tata cara serta jadwal pencalonan dan pemilihan calon definitif, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:----------

   a) Kepastian jadwal serta tata cara pencalonan. ----------

   b) Jadwal yang dimaksud dalam huruf a harus memperhatikan tenggang waktu yang cukup bagi calon untuk mempersiapkan pencalonannya. ----------

   c) Diketahui oleh Anggota, daftar seluruh calon yang masuk melalui pencalonan diri maupun dicalonkan. ----------

d) Didapatnya daftar calon yang sah disertai keterangan yang cukup mengenai calon-calon tersebut oleh seluruh Anggota dan tenggang waktu yang cukup bagi Anggota untuk menilai dan memilih. ----------

5. Seorang calon hanya dapat menjadi calon Dewan Pengurus atau calon Anggota Dewan Pengawas sejauh pencalonannya memenuhi ketentuan yang disebut dalam ayat (1), (2), (3) pasal ini. ----------

---------- **Bagian Keempat** ----------

---------- **Waktu Dan Cara Pemilihan** ----------

---------- **Pasal 42** ----------

1. Panitia Pemilihan sudah harus mengumumkan nama-nama Calon Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas sebelum dimulainya Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. ----------
2. Ketua Umum dipilih melalui sistem formatur tunggal Calon Ketua Umum dalam Musyawarah Nasionalatau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang kemudian menunjuk Dewan Pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal/Umum dan 1 (satu) orang Bendahara dari daftar calon yang mencalonkan diri sebagai Dewan Pengurus. ----------
3. Dewan Pengawas dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang dari daftar Calon Dewan Pengawas yang mencalonkan diri dari daftar yang sah dalam Musyawarah Nasional yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan. ----------
4. Setiap pemilih mempunyai hak 1 (satu) suara untuk memilih masing-masing 1 orang Calon Ketua Umum dan 7 (tujuh) orang Calon anggota Dewan Pengawas sesuai tata cara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan. ----------
5. Tata cara pemilihan diatur oleh Panitia Pemilihan yang harus dapat menjamin: ----------
   a) Tingkat kerahasiaan suara pemilih.----------
   b) Surat suara yang diterima dari pemilih yang sah harus dapat diawasi dan dibuktikan oleh Panitia Pemilihan. ----------
   c) Pemilih benar-benar memiliki hak untuk memilih sesuai dengan ketentuan yang tetapkan oleh Panitia Pemilihan. ----------
   d) Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak. ----------
   e) Cukup waktu bagi pemilih untuk menentukan pemilihan suaranya. ----------
6. Panitia Pemilihan harus sudah mengumumkan susunan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Umum, dan Bendahara serta Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada acara

sidang terakhir dari Musyawarah, untuk kemudian ditetapkan oleh Anggota dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. ----------

---------- **Bagian Kelima** ----------

----------**Panitia Pemilihan** ----------

---------- **Pasal 43** ----------

1. Panitia Pemilihan dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum. ----------
2. Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Panitia, seorang Sekretaris panitia dan 5 (lima) orang anggota. ----------
3. Dalam pelaksanaan tugasnya panitia pemilihan secara teknis dibantu oleh Badan Pelaksana Harian. ----------
4. Biaya pelaksanaan pemilihan merupakan biaya APJII. ----------
5. Panitia Pemilihan adalah Anggota Penyelenggara dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Nasional. ----------
6. Panitia pemilihan sudah harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan mengadakan pemilihan pengurus baru itu diadakan.----------

---------- **Bagian Keenam** ----------

----------**Serah Terima** ----------

---------- **Pasal 44** ----------

1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Musyawarah Nasional memilih Ketua Umum baru, Ketua Umum lama harus melakukan serah terima kepengurusan kepada Ketua Umum Baru. Hal yang sama berlaku pula untuk Dewan Pengawas.----------
2. Serah terima kepengurusan yang disebut pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya menyangkut pemindahan yang jelas dari: ----------
   a) Keuangan organisasi. ----------
   b) Administrasi organisasi seperti misalnya namun tidak terbatas pada jabatan EX OFFICIO sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Anggaran Dasar. ----------
   c) Inventaris organisasi. ----------
   d) Kegiatan organisasi yang sedang berjalan. ----------
3. Serah terima Dewan Pengawas sekurang-kurangnya menyangkut kegiatan Dewan Pengawas yang sedang berjalan. ----------

4. Serah terima yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) di atas, tidak berarti melepaskan tanggungjawab pengurus sebelumnya atas kebenaran laporan atau data yang diserah-terimakan. ----------
5. Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang sedang menjabat tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis dan jangka panjang 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan. Keputusan strategis dan jangka panjang dapat ditunda hingga terbentuk Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang baru. ----------
6. Keputusan strategis dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah: --
   a. Keputusan-keputusan yang mengikatkan organisasi lebih dari masa kepengurusan. ----
   b. Melakukan pembelian-pembelian yang bersifat investasi jangka panjang (asset).---------
   c. Melakukan pengeluaran yang tidak terencana di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). ----------
   d. Melakukan penambahan terhadap pengeluaran rutin. ----------
   e. Melakukan rekruitmen Badan Pelaksana Harian atau menaikan struktur penggajian. ---
7. Selama masa antara terpilihnya Dewan Pengurus Baru dan serah terima tersebut, Dewan Pengurus lama tetap bekerja dan mendampingi Dewan Pengurus baru dalam rapat-rapat yang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan sikap organisasi dan hubungan-hubungan ke luar yang perlu dilakukan. Hal yang sama berlaku pula untuk Dewan Pengawas sesuai dengan tugas-tugas Dewan Pengawas.----------

---------- BAB IX ----------

----------FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT ----------

---------- Bagian Kesatu ----------

---------- Bentuk Dan Penjadwalan ----------

---------- Pasal 45 ----------

APJII memiliki beberapa bentuk rapat anggota dan/atau forum pertemuan dengan penjelasan personil dan jadwal kegiatannya sebagai berikut: ----------

1. Musyawarah Nasional 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun.----------
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila memenuhi persyaratan yang terdapat di Pasal 50 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga.----------
3. Musyawarah Wilayah 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. ----------
4. Rapat Kerja Nasional 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun. ----------
5. APJII *Open Policy Meeting* (OPM) maksimal 2 (dua) kali setiap 1 (satu) tahun. ----------
6. Rapat Khusus Unit IDNIC APJII 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. ----------
7. Rapat Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.----------

8. Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.----------
9. Rapat Dewan Pengawas minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. ----------
10. Rapat-rapat lain disesuaikan dengan kebutuhan. ----------

----------**Bagian Kedua**----------

---------- **Musyawarah Nasional** ----------

---------- **Paragraf 1**----------

---------- **Tata Cara Musyawarah Nasional** ----------

---------- **Pasal 46** ----------

1. Musyawarah Nasional adalah musyawarah tertinggi yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali yang bertujuan untuk memilih Ketua Umum, dan Anggota Dewan Pengawas, serta menjadi wadah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban bagi Pengurus yang telah berjalan. ----------
2. Musyarawah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dan apabila ada halangan dalam penyelenggaraan, maka Musyawarah Nasional yang telah terjadwal harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal yang telah terjadwal. ----------
3. Segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dikerjakan dan disiapkan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, serta wajib didistribusikan kepada Anggota APJII pada saat Musyawarah Nasional diselenggarakan.----------
4. Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus dalam hal penyelenggaraan Musyawarah Nasional membentuk: ----------
   a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*). ----------
   b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*). ----------
   c. Panitia Pemilihan (*Election Committee*). ----------

---------- **Paragraf 2** ----------

---------- **Peserta Musyawarah Nasional** ----------

---------- **Pasal 47** ----------

1. Peserta Musyawarah Nasional APJII adalah semua Anggota APJII sesuai ketentuan dalam BAB VII Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar APJII. ----------
2. Hak Anggota Penyelenggara sebagai peserta Musyawarah Nasional adalah mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.----------

3. Kewajiban peserta Musyawarah Nasional adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib Musyawarah Nasional dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional.

Paragraf 3

Waktu, Tempat, Dan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional

Pasal 48

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali dengan waktu yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional APJII sebelumnya.
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus yang disetujui oleh Dewan Pengawas.
3. Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana dan Panitia Pemilihan Musyawarah Nasional diangkat oleh Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas, untuk menyusun acara dan materi Musyawarah Nasional serta melaksanakan Musyawarah Nasional.
4. Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional dianggarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus.

Paragraf 4

Pimpinan Sidang, Acara, Dan Tata Tertib

Pasal 49

1. Pimpinan sidang pada Musyawarah Nasional dipilih oleh sidang Musyawarah Nasional yang dipimpin oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*).
2. Pimpinan sidang terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris sidang.
3. Rencana acara dan tata tertib sidang yang disampaikan oleh Panitia Pengarah, adalah usulan untuk disetujui atau diperbaiki oleh sidang Musyawarah Nasional.

Bagian Ketiga

Musyawarah Nasional Luar Biasa

Pasal 50

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila ada hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional.
2. Hal mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Pergantian Ketua Umum karena berhalangan tetap dan/atau tidak menjalankan tugas dan fungsi.
   b. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

3. Dalam Pegantian Ketua Umum sebagaimana ayat (2) huruf a di atas, kedudukan Ketua Unit IDNIC APJII berakhir sesuai dengan berakhirnya kedudukan Ketua Umum. ----------
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana ayat (2) huruf a, Unit IDNIC mengadakan Rapat Khusus yang bertujuan untuk memilih Ketua Unit IDNIC yang baru.----------
5. Musyawarah Nasional Luar Biasa seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 45 ayat (2) dapat diselenggarakan jika memenuhi persyaratan berikut: ----------
   a. Diusulkan dalam Rapat Dewan Pengawas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengawas; dan/atau ----------
   b. Diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 1/4 (satu per empat) dari jumlah Anggota Penyelenggara yang terdaftar. ----------
6. Keputusan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa diambil dalam Rapat Pleno Dewan Pengawas dan Pengurus yang dibuat khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus; ----------
7. Hasil Rapat Pleno Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus sebagaimana dalam ayat (6) di atas, ditetapkan dalm Surat Keputusan Dewan Pengawas. ----------
8. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah anggota yang masuk kategori Anggota Penyelenggara. ----------
9. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Surat Keputusan Dewan Pengawas ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). ----------
10. Tata cara dan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sebagaimana penyelenggaraan Musyawarah Nasional. ----------
11. Undangan Khusus dan/atau Peninjau ditiadakan dalam Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa. ----------

---------- Bagian Keempat ----------

----------Rapat Khusus Unit IDNIC APJII----------

---------- Paragraf 1 ----------

---------- Tata Cara Rapat Khusus Unit IDNIC APJII ----------

---------- Pasal 51 ----------

1. Rapat Khusus Unit IDNIC APJII diadakan 3 (tiga) tahun sekali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Musyawarah Nasional APJII, yang bertujuan untuk memilih Ketua Unit IDNIC. ----------

2. Apabila ada halangan dalam penyelenggaraan, maka Rapat Khusus Unit IDNIC APJII yang telah terjadwal harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal yang telah terjadwal. ----------
3. Segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Khusus Unit IDNIC APJII, dikerjakan dan disiapkan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, serta didistribusikan kepada Anggota IDNIC pada saat Rapat Khusus Unit IDNIC APJII diselenggarakan. ----------
4. Dalam hal penyelenggaraan Rapat Khusus Unit IDNIC APJII Panitia Pengarah (*Steering Committee*), Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) dan Panitia Pemilihan (*Election Committee*) menjadi satu dengan Musyawarah Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga. ----------

----------Paragraf 2 ----------

----------Peserta Rapat Khusus Unit IDNIC APJII ----------

---------- Pasal 52 ----------

1. Peserta Rapat Khusus Unit IDNIC APJII adalah Anggota APJII yang masuk kedalam kategori Anggota IDNIC APJII. ----------
2. Hak Anggota sebagai peserta Anggota IDNIC APJII adalah mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai Ketua Unit IDNIC APJII. ----------

----------Bagian Kelima ----------

----------Musyawarah Wilayah ----------

---------- Paragraf 1 ----------

---------- Tata Cara Musyawarah Wilayah ----------

---------- Pasal 53 ----------

1. Musyawarah Wilayah adalah musyawarah tertinggi wilayah yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Musyawarah Nasional, yang bertujuan untuk memilih Ketua Pengurus Wilayah dan menjadi wadah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban bagi kepengurusan berjalan. ----------
2. Apabila ada halangan dalam penyelenggaraannya, maka Musyawarah Wilayah yang telah terjadwal harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal yang telah dijadwalkan. ----------
3. Segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah, dikerjakan dan disiapkan oleh Pengurus Wilayah berjalan, serta didistribusikan kepada Anggota Wilayah pada saat Musyawarah Wilayah diselenggarakan. ----------

---------- Paragraf 2 ----------

Peserta Musyawarah Wilayah

Pasal 54

1. Peserta Musyawarah Wilayah adalah Anggota Penyelenggara yang beroperasi di Wilayah terkait.
2. Hak Anggota sebagai peserta Musyawarah Wilayah adalah mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai ketua Pengurus Wilayah.

Bagian Keenam

Rapat Kerja Nasional

Pasal 55

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus.
3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
   a. Dewan Pengawas;
   b. Dewan Pengurus;
   c. Pengurus Wilayah;
   d. Anggota Penyelenggara.
   e. Badan Pelaksana Harian.

Bagian Ketujuh

APJII *Open Policy Meeting*

Pasal 56

1. Tujuan utama APJII *Open Policy Meeting* adalah membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada publik.
2. APJII *Open Policy Meeting* diselenggarakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. APJII *Open Policy Meeting* diselenggarakan oleh Dewan Pengurus.
4. Hal-hal utama yang dibahas dalam APJII *Open Policy Meeting* adalah:

a. NIR (*National Internet Registry*), layanan *small multihoming* yang difasilitasi oleh Anggota APJII, http://www.apiii.or.id

b. IDNIC (*Indonesia Network Information Center*) meliputi Pelayanan Penomoran PI (Protocol Internet) dan ASN (Autonomous System Number), http://www.idnic.net.id

c. IIX (*Indonesia Internet Exchange*), Jaringan Interkoneksi Internet di Indonesia, http://www.iix.net.id

d. Hal-hal lain yang belum diatur terkait dengan fasilitas APJII.

5. APJII *Open Policy Meeting* dihadiri oleh:

a. Dewan Pengawas ; ----------
b. Dewan Pengurus ; ----------
c. Pengurus Wilayah ; ----------
d. Anggota APJII ; ----------
e. Badan Pelaksana Harian, dan ----------
f. Undangan Khusus dan/atau Peninjau yang jumlah dan namanya ditentukan oleh Dewan Pengurus. ----------

Bagian Kedelapan

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 57

1. Rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. -
2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas. ----------
3. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat memimpin Rapat, maka Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Anggota Dewan Pengawas yang hadir. ----------
4. Bila diperlukan, rapat dapat dihadiri oleh Badan Pelaksana Harian. ----------

Bagian Kesembilan

Rapat Dewan Pengurus

Pasal 58

1. Rapat Dewan Pengurus diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengurus, sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------
2. Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. ----------
3. Bila diperlukan, rapat dapat dihadiri oleh Badan Pelaksana Harian. ----------

Bagian Kesepuluh

Rapat-rapat Lain

Pasal 59

1. Rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh tim/kelompok kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus diatur dalam Peraturan dan Keputusan Internal APJII. ----------
2. Hasil rapat disampaikan kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah rapat berakhir. ----------

Bagian Kesebelas

Quorum Dan Keabsahan Rapat

Pasal 60

1. Selain yang ditentukan dalam Pasal 46, 47, dan 48 Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Nasional dianggap sah bila: ----------
   a. Kepada Anggota melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilaksanakannya Musyawarah Nasional; ----------
   b. Telah memenuhi *quorum* yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu); ----------
   c. Dalam hal *quorum* tidak tercapai, maka Rapat ditunda tiap 30 (tiga puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam (dua kali penundaan);----------
   d. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf c, *quorum* belum juga tercapai, maka Rapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil sah.----------
2. Musyawarah Wilayah dianggap sah bila: ----------
   a. Kepada Anggota melalui Pengurus Wilayah telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilaksanakannya Musyawarah Wilayah; ----------
   b. Telah memenuhi *quorum* yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu); ----------
   c. Dalam hal *quorum* tidak tercapai,maka Musyawarah ditunda tiap 30 (tiga puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam (dua kali penundaan); --------
   d. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf c, *quorum* belum juga tercapai, maka Musyawarah terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil sah. ----
3. Rapat Khusus IDNIC dianggap sah bila: ----------
   a. Telah memenuhi *quorum* yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah Anggota IDNIC APJII yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu);----------
   b. Dalam hal *quorum* tidak tercapai,maka Rapat ditunda tiap 30 (tiga puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam (dua kali penundaan); ----------
   c. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf c, *quorum* belum juga tercapai, maka Rapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil sah. ----------
4. APJII *Open Policy Meeting* dianggap sah bila:----------

a. Kepada Anggota melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilaksanakannya APJII *Open Policy Meeting*;

b. Telah memenuhi *quorum* yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu);

c. Dalam hal *quorum* tidak tercapai,maka APJII *Open Policy Meeting* ditunda tiap 30 (tiga puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam (dua kali penundaan);

d. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf c, *quorum* belum juga tercapai, maka APJII *Open Policy Meeting* terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil sah.

5. Rapat Dewan Pengawas adalah sah apabila:

a. Kepada Anggota Dewan telah dikirimkan undangan disertai acara dan materi rapat, 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat;

b. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 61

1. Setiap forum pertemuan dan rapat-rapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah yang hadir ditambah 1 (satu) orang Peserta yang memiliki hak suara.
3. Pemungutan suara mengenai orang harus dilaksanakan secara tertutup kecuali jika keputusan dapat diambil secara aklamasi.
4. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak dapat dicapai, maka pimpinan rapat berhak menunda keputusan tersebut selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sejak tidak tercapainya keputusan dan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengambil ulang keputusan pada pertemuan berikutnya.

BAB X

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 62

1. APJII memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Anggaran Dasar.
2. Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
3. Uang Pangkal dibayarkan pada saat pendaftaran keanggotaan yang nilainya ditetapkan berdasarkan peraturan asosiasi.
4. Iuran Penggunaan Fasilitas dibayarkan pada saat ditagih oleh APJII kepada Anggota yang nilainya ditetapkan berdasarkan peraturan asosiasi.
5. Iuran Anggota dibayarkan tahunan.
6. Uang hasil kegiatan APJII secara langsung dan tidak langsung dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah kegiatan selesai diselenggarakan.
7. Kriteria Uang Kegiatan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
8. Untuk memperkuat keuangan APJII, Dewan Pengurus dibenarkan untuk mengadakan upaya-upaya lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketatalaksanaan asosiasi APJII serta ketentuan perundangan yang berlaku; hasil dan pemanfaatannya diserahkan kepada Dewan Pengurus.
9. Uang yang merupakan sumber pemasukan APJII dibayarkan kepada Bendahara APJII.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana

Pasal 63

Penggunaan dan pengelolaan dana APJII ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan ketentuan tersebut diatur dalam keputusan tersendiri, termasuk masalah Tahun Pembukuan, Lalu Lintas dan Mutasi Keuangan, dan lain sebagainya.

Bagian Ketiga

Pengawasan Penggunaan Dana

Pasal 64

1. Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan dana APJII dilakukan oleh Dewan Pengawas, berdasarkan pertanggungjawaban tertulis Dewan Pengurus dengan dibantu oleh Badan Pelaksana Harian.
2. Dewan Pengawas menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Keuangan (*financial audit*) setiap tahun.
3. Setiap rapat Dewan Pengurus maupun Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus, laporan keuangan wajib disampaikan sebagai pemantauan kegiatan asosiasi.

4. Dewan Pengurus wajib melaporkan pengelolaan keuangan asosiasi kepada seluruh anggota melalui Rapat Kerja Nasional, dan pertanggungjawaban melalui Musyawarah Nasional. ----------

---------- **Bagian Keempat** ----------

---------- **Perbendaharaan Dan Pengelolaannya** ----------

---------- **Pasal 65** ----------

1. Perbendaharaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik APJII diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Ketua Umum. ----------
2. Daftar Inventaris/perbendaharaan APJII wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus dalam setiap Laporan Pertanggungjawaban di Rapat Kerja Nasional maupun Musyawarah Nasional. ----------
3. Apabila asosiasi dibubarkan, maka tata cara likuidasi ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan untuk keperluan khusus. ----------

---------- **BAB XI** ----------

---------- **PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 66** ----------

---------- **Perubahan Dan Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga** ----------

1. Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga APJII yang pertama dilakukan atas Keputusan Musyawarah Nasional III APJII yang dibuat dihadapan DARBI, Sarjana Hukum pada waktu itu Notaris di Jakarta pada tanggal 27-05-2002 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua), perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga APJII yang kedua dilakukan atas Keputusan Musyawarah Nasional IV APJII yang dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 03-05-2005 (tiga Mei dua ribu lima), perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga APJII yang ketiga dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII, yang dibuat dihadapan, saya, Notaris, pada tanggal ---------- 22-07-2009 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan), perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga APJII yang keempat dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional VI APJII, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pada waktu itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 24-07-2009 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan), serta perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga APJII yang kelima dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional VII APJII, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pada waktu itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 31-08-2012 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua belas). ----------

2. Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan dihadiri oleh ¾ dari jumlah keseluruhan Anggota Penyelenggara dan keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah suara yang sah yang terdaftar dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. ----------

----------**Paragraf 2**----------

----------**Penggabungan dan Pembubaran Asosiasi**----------

----------**Pasal 67**----------

1. APJII hanya dapat melakukan penggabungan dan pembubaran melalui Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dan dihadiri oleh ¾ dari jumlah keseluruhan Anggota Penyelenggara dan keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah suara yang sah yang terdaftar dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. ----------
2. Dalam hal Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk memutuskan penggabungan dan/atau pembubaran asosiasi, maka akan dibentuk Panitia Likuidasi oleh Dewan Pengawas untuk mengurus harta benda asosiasi. ----------
3. Bila terdapat harta milik APJII pada saat pembubaran, maka Panitia Likuidasi diberi kewenangan untuk menyerahkan harta benda APJII tersebut sesuai dengan keputusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. ----------
4. Bila terdapat hutang yang menjadi beban tanggungan APJII, maka pembebanan hutang merupakan tanggungjawab seluruh Anggota secara tanggung renteng. ----------

---------- **Paragraf 3** ----------

---------- **Peraturan Pelaksana** ----------

---------- **Pasal 68** ----------

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus melalui keputusan-keputusan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat serta makna isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII. ----------
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII pertama kali disahkan pemakaiannya sejak tanggal 24-05-1996 (duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) disebut sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asli. ----------

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud ayat (2) Pasal ini tetap berlaku kecuali terdapat perubahan-perubahan sebagian Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. ----------
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud ayat (3) Pasal ini dijadikan landasan kebijakan operasional bagi Anggota APJII, serta Pengurus Terpilih melalui Musyawarah Nasional sesuai dengan periode-periode operasional atau antar-waktu. -------

----------**Ketentuan Peralihan** ----------

---------- **Pasal 69** ----------

1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan. ----------
2. Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus wajib menyesuaikan dengan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya sampai dengan Musyawarah Nasional berikutnya.----------

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu yang tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh : ----------

1. Tuan EKO HADI PRASETIO, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta pada tanggal 25-03-1971 (duapuluh lima Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), bertempat tinggal di Jakarta, jalan Padang Panjang nomor 13, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3174022503710002Warga Negara Indonesia; dan,----------
2. Nyonya SULASTRI, lahir di Jakarta pada tanggal 19-05-1980 (sembilanbelas Mei seribu - sembilanratus delapanpuluh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Manggarai Selatan 8, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3174015905800006 Warga Negara Indonesia, ----------

-kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, yang telah dikenal oleh saya, Notaris sebagai saksi-saksi. ----------

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Penghadap juga membubuhkan sidik jari jempol tangan kanannya pada lembaran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan minuta akta ini. ----------

-Dilangsungkan dengan memakai tiga perubahan yaitu karena satu tambahan dan dua coretan dengan gantian, tanpa coretan. ----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------

---------- NOTARIS DI JAKARTA, -------



(HIZMELINA, SH)